



4. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Adapun Evaluasi Pencapaian SPM sebanyak 15 Bidang pada periode tahun 2014, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perhubungan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Komunikasi dan Informasi, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Penanaman Modal, dan Bidang Kesenian. Adapun capaian SPM, dapat dilihat dalam uraian dibawah ini :

1) Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pendidikan memiliki 27 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.1
Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Pelayanan Dasar /Indikator SPM	Nilai Nasional 2014	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Unit	Realisasi 2014		
					Pembi- lang	Penye- but	Nilai
I	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN / KOTA						
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km	100%	Dinas Pendidikan	SD	8	8	100%
				MI	1	1	100%



No	Pelayanan Dasar /Indikator SPM	Nilai Nasional 2014	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Unit	Realisasi 2014		
					Pembi- lang	Penye- but	Nilai
	untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil			SMP	2	2	100%
				MTs			
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	100%	Dinas Pendidikan	SD	383	545	70,27%
				MI	177	222	79,73%
				SMP	116	155	74,83%
				MTs	39	58	67,24%
	Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100%	Dinas Pendidikan	SD	306	545	56,14%
				MI	191	222	79,73%
				SMP	110	155	70,96%
				MTs	47	58	81,03%
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	100%	Dinas Pendidikan	SMP	114	155	73,54%
				MTs	29	58	50%
				SMP		155	
				MTs		58	
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	100%	Dinas Pendidikan	SD	456	456	83,6%
				MI	206	222	92,7%
				SMP	149	155	96,1%
				MTs	52	58	89,6%
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100%	Dinas Pendidikan	SD	532	545	97,6%
				MI	220	222	99%
				SD	540	545	99%
				MI	220	222	99%
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100%	Dinas Pendidikan	SMP	109	155	70,3%
				MTs	32	58	55,1%
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	Dinas Pendidikan	SD	541	545	99,26%
				MI	221	222	99,54%
				SD	499	545	91,55%
				MI	181	222	81,53%



No	Pelayanan Dasar /Indikator SPM	Nilai Nasional 2014	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Unit	Realisasi 2014		
					Pembi- lang	Penye- but	Nilai
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100%	Dinas Pendidikan	SMP	155	155	100%
				MTs	55	58	94,8%
				SMP	72	155	46,45%
				MTs	30	58	51,72%
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn	100%	Dinas Pendidikan	SMP		155	
				MTs		58	
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	Dinas Pendidikan	SD	504	545	90,4%
				MI	179	222	80,6%
11.	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100%	Dinas Pendidikan	SMP	124	155	80%
				MTs	46	58	79,3%
12.	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100%	Dinas Pendidikan	SD	45	45	100%
				MI			
13.	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100%	Dinas Pendidikan	SD			100%
				MI			100%
				SMP			100%
				MTs			100%
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3	100%	Dinas Pendidikan	SD	285	545	52,29%
				MI		222	



No	Pelayanan Dasar /Indikator SPM	Nilai Nasional 2014	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Unit	Realisasi 2014		
					Pembi- lang	Penye- but	Nilai
	jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;			SMP	42	155	27%
				MTs		58	
II	PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN						
15.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	Dinas Pendidikan	SD	110769	162639	68,1%
				MI		44529	
				SD	163	545	29,9%
				MI		222	
16.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100%	Dinas Pendidikan	SMP	36504	74608	48,9%
				MTs		16213	
				SMP	41	155	26,45%
				MTs		58	
17.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	100%	Dinas Pendidikan	SD	162	545	37,7%
				MI		222	
18.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100%	Dinas Pendidikan	SD	206	545	37,7%
				MI		222	
				SMP	64	155	41,2%
				MTs		58	
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100%	Dinas Pendidikan	SD	5981	12384	48,2%
				MI			
				SMP	246	545	45,1%
				MTs		155	
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu	100%	Dinas Pendidikan	SD	545	545	100%
				MI	222	222	100%
				SMP	155	155	100%
				MTs	58	58	100%
21.	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100%	Dinas Pendidikan	SD	545	545	100%
				MI	222	222	100%
				SMP	155	155	100%
				MTs	58	58	100%
22.	Setiap guru yang menerapkan Rencana	100%	Dinas	SD	405	545	74,3%



No	Pelayanan Dasar /Indikator SPM	Nilai Nasional 2014	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Unit	Realisasi 2014		
					Pembi- lang	Penye- but	Nilai
	Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya		Pendidikan	MI		222	
				SMP	110	155	70,9%
				MTs		58	
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	Dinas Pendidikan	SD	395	545	72,4%
				MI		222	
				SMP	106	155	68,3%
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	Dinas Pendidikan	MTs		58	
				SD	407	545	74,6%
				MI		222	
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100%	Dinas Pendidikan	SMP	28	155	18%
				MTs		58	
				SD	382	545	70%
26.	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester	100%	Dinas Pendidikan	MI		222	
				SMP	113	155	72,9%
				MTs		58	
27.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	Dinas Pendidikan	SD	510	545	93,5%
				MI		222	
				SMP	144	155	92,9%
				MTs		58	
				SD	489	545	89,72%
				MI		222	
				SMP	144	155	92,9%
				MTs		58	

2) Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan memiliki 18 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :



Tabel III.D.2

Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	Dinas Kesehatan	17.004	36.932	46,04%
2.		Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	Dinas Kesehatan	1.892	7.386	25,62%
3.		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	Dinas Kesehatan	16.012	35.253	45,42%
4.		Cakupan pelayanan Ibu nifas	95%	Dinas Kesehatan	15.892	35.253	45,08%
5.		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	Dinas Kesehatan	1.056	4.939	21,38%
6.		Cakupan kunjungan bayi	90%	Dinas Kesehatan	16.151	32.827	49,20%
7.		Cakupan Desa / kelurahan universal child immunization (UCI)	≥95%	Dinas Kesehatan			Semester 2
8.		Cakupan pelayanan anak balita.	90%	Dinas Kesehatan	50.702	63.360	80,02%
9.		Cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin	100%	Dinas Kesehatan	255	289	88,24%
10.		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Dinas Kesehatan	16	16	100%



11.		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	Dinas Kesehatan			Semester 2
12.		Cakupan peserta KB aktif	70%	Dinas Kesehatan	272.404	436.075	62,47%
13.		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit					
		a. Penemuan penderita AFP	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	Dinas Kesehatan	7	100.000	7/100.000
		b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%	Dinas Kesehatan	4.303	3.400	126,56%
		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	90%	Dinas Kesehatan	457	790	57,85%
		d. Penemuan dan penanganan DBD	100%	Dinas Kesehatan	69	69	100 %
		e. Penanganan penderita diare	100%	Dinas Kesehatan	33.059	22.522	146,79%
14.		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	Dinas Kesehatan			Semester 2
15.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	Dinas Kesehatan			Semester 2
16.		Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten / Kota	100%	Dinas Kesehatan	25	25	100%
17.	Penyelidikan epidemiologi dan penanganan KLB	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	Dinas Kesehatan	16	16	100%
18.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	Dinas Kesehatan	347	353	98,30%



3) **Urusan Sosial**

Urusan Sosial memiliki 4 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.3

Capaian SPM Bidang Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembil ang	Penyeb ut	Nilai
1.	Pelaksanaan program /kegiatan bidang sosial						
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	17.962	36.700	48,9%
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kot	Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang menerima program pemberdayaansosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	6.246	6.896	90,6%
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial						
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	99	99	100%
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	5	11	45,5%
3.	Penanggulangan korban bencana						



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembil ang	Penyeb ut	Nilai
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) korban bencana skalakabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.000	27.291	98,9%
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skalakabupaten/kota yang dievakuasi denganmenggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85	85	100%
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) penyandang cacat fisikdan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	145	100	145%

4) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup memiliki 4 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.4

Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2013)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembil ang	Penye but	Nilai
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air;	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	Badan Lingkungan Hidup	15	20	75%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2013)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	Badan Lingkungan Hidup	18	20	90%
3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luasan lahan dan / atautanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.	100%	Badan Lingkungan Hidup	-	-	Nihil
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	Badan Lingkungan Hidup	8	10	80%

5) **Urusan Perumahan**

Urusan Perumahan memiliki 3 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.5

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang			
2.		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang			



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
3.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	95%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	353	353	100%

6) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan SPM Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memiliki 8 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.6

Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	BPMPKB	81	81	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	BPMPKB RSUD Dinas Kesehatan	2	10	5%
3.	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	BPMPKB Dinsosnaker	6	6	100%
4.		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	BPMPKB	6	6	100%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
5.	Penegakan dan bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	BPMPKB Pengadilan Negeri Polres Kejaksaan	-	-	-
6.		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	BPMPKB Pengadilan Negeri Polres Kejaksaan	-	-	-
7.	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	BPMPKB Dinsosnaker	6	81	7%
8.		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	BPMPKB Dinsosnaker	80	6	1333%

7) **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera memiliki 3 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.7

Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.608	371.758	0,43%
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	283.937	371.758	76,4%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	42.604	371.758	11,5%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	15.689	18.842	83,3%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.998	7.785	77%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	104 x 2	353	59%
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	353	353	100%
2.	Penyediaan Alat dan obat Kontra sepsi.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5	30	17%
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	353	353	100%

8) **Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 25 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.8

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai Nasional (2019)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
						Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Sumber Daya Air	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100 %	PDAM, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang	37.000.000	45.784.556	80,8%
2.			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70 %	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	49.722	61.963	80%
3.	Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	60%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	899,28	899,28	100%
4.			Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota.	100 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	899,28	899,28	100%



No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai Nasional (2019)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
						Pembilang	Penyebut	Nilai
5.	Cipta Karya	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	82%	PDAM, Dinas Kesehatan, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang	394.400	2.128.459	18,5%
6.		Penyediaan Sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%	DPU Cipta Karya dan Tata Ruang			
7.			Pengurangan sampah di perkotaan	20 %	Dinas Kebersihan & Pertamanan	713.370	2.090.619	34%
8.			Persentase pengangkutan sampah	70%	Dinas Kebersihan & Pertamanan	201.736	2.090.619	10%
9.			Persentase pengoperasian TPA	70%	Dinas Kebersihan & Pertamanan	40% + 40% + 10%		90%
10.			Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50 %	DPU Cipta Karya dan Tata Ruang			
11.		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	950	950	100%
12.		Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10 %	DPU Cipta Karya dan Tata Ruang			- Belum ada perda
13.	Jasa Konstruksi	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60 %	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	7	7	100%
14.		Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100 %	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	95	95	100%
15.	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kabupaten dan kecamatan	100 %	Bappeda	1	1	100%
				100 %	Bappeda	18	18	100%



No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai Nasional (2019)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
						Pembilang	Penyebut	Nilai
16.		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.	50 %	DPU Cipta Karya dan Tata Ruang	127.798,10	1.078.253	11,8%

9) **Urusan Ketenagakerjaan**

Urusan Ketenagakerjaan memiliki 8 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.9

Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2016)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	396	396	100%
2.		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	60%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	-	-	Semester 2
3.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	40%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	3.211	3.619	88,72%
4.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	5	62	8 %
5.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	172.223	495.386	34,76%
6.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	720	2.681	26,8%
7.		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	Dinas Sosial & Tenaga Kerja	480	8354	5,74%



10) **Urusan Komunikasi dan Informasi**

Urusan Komunikasi dan Informasi memiliki 2 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.10

Capaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:					
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali/th	Bagian Humas & Protokol	8	12	66%
		b. Media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i>);	Tiap hari	Bagian Telematika	365	365	100%
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12kali/t h	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	15	12	125%
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;	12kali/t h	SKPD Terkait	5	12	41%
		e. Media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12kali/t h	SKPD Terkait	29	12	241%
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	Bagian Telematika	18	18	100%



11) **Urusan Ketahanan Pangan**

Urusan Ketahanan Pangan memiliki 7 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.11

Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90%	Dinas Ketahanan Pangan & PP	356,25	2	178,25%
2.		Penguatan Cadangan Pangan.	60%	Dinas Ketahanan Pangan & PP	117.928,61	365	323%
3.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	Dinas Ketahanan Pangan & PP	215,07	3	71.69%
4.		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	Dinas Ketahanan Pangan & PP	11,38	11,38	100%
5.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	Dinas Ketahanan Pangan & PP			57,16%
6.		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	Dinas Ketahanan Pangan & PP	15	15	100%
7.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	Dinas Ketahanan Pangan & PP	6	6	100%

12) **Urusan Kebudayaan**

Urusan Kebudayaan memiliki 2 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.12

Capaian SPM Bidang Kesenian

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang	Cakupan Kajian Seni	50%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	8	15	53,33%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
	Kesenian	Cakupan Fasilitas Seni	30%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	2	7	28,57%
		Cakupan Gelar Seni	75%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	3	4	75%
		Misi Kesenian	100%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	100%
2.	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	5	8	62,5%
		Cakupan Tempat	100%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	2	2	100%
		Cakupan Organisasi	34%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	2	3	67%

13) Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan memiliki 4 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.13

Capaian SPM Bidang Perhubungan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
						Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan angkutan jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	Dinas Perhubungan	1210	1210	100%
			Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yg telah berkembang pada wilayah yang tersedia jaringan jalan	60%	Dinas Perhubungan	1210	1210	100%



No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
						Pembilang	Penyebut	Nilai
		b. Jaringan prasarana angkutan jalan	Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	Dinas Perhubungan	16	16	100%
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kabupaten yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	Dinas Perhubungan	7	7	100%
		c. Fasilitas Perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	60%	Dinas Perhubungan	18959	18000	105,3%
		d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60%	Dinas Perhubungan	1	2	50%
		e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal	50%	Dinas Perhubungan	26	54	48%
			Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	Dinas Perhubungan	23	30	76,6%
			Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir kabupaten	40%	Dinas Perhubungan	25	25	100%
			Tersedianya SDM yg memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	Dinas Perhubungan	12	12	100%
		f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kabupaten	100%	Dinas Perhubungan	1210	1210	100%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
2	Angkutan Sungai dan Danau	TIDAK DITERAPKAN					
3	Angkutan Penyeberangan	TIDAK DITERAPKAN					
4	Angkutan Laut	TIDAK DITERAPKAN					

14) **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki 11 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.14

Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas waktu pencapaian	SKPD Terkait	Realisasi 2014		
						Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%	2015	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	574.437	639.712	89,79%
2.		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2015	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.132.086	1.556.525	72,73%
3.		Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	100%	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.952	16.020	18,43%
4.		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70%	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	262		100% terhadap layanan
5.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	2015	Satuan Polisi Pamong Praja	1484	1494	99,33%
6.		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dlm sehari	2014	Satuan Polisi Pamong Praja	9	18	50%



7.		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satuan Polisi Pamong Praja	5534	8429	0,7%
8.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	80%	2015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150	714,24	21%
9.		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75%	2015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	76	39,47%
10.		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33	54	61,1%
11.		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	2015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	10	50%

15) Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal memiliki 7 SPM, capaian SPM dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel III.D.15

Capaian SPM Bidang Penanaman Modal

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 sektor/ bidang	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1	1	100%
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan,	1 kali/ tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	10	1	1000%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
		Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat propinsi / nasional					
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 kali/ tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	4	1	400%
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, al : 1. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri 2. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri 3. Izin usaha penanaman modal dalam negeri 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sesuai kewenangan pemkab	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	5	6	83,3%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/ tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2	1	200%
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), al : 1. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri 2. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri 3. Izin usaha penanaman modal dalam negeri 4. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	4	4	100%
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia	1 kali/ tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2	1	200%



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2014)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2014		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
	Penanaman Modal	usaha					

5. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Hak tersebut diantaranya adalah perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI, pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2014 sebanyak 26 urusan.

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan terutama dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

a. Rasio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA

Rasio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA merupakan perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA dibagi jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2014, rasio tersebut mencapai 75,79%. Rasio ini diperoleh dari jumlah anak dalam jenjang TK/RA sebanyak 65,489 anak dibanding jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun sebanyak 96,961 anak. Pada tahun 2013 dengan jumlah anak dalam jenjang TK/RA sebanyak 66,224 anak dari jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun seluruhnya sebanyak 90,148 anak dengan prosentase 73,46%.

Tingginya rasio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA dikarenakan:

- Orang tua/wali murid semakin menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini
- Akseibilitas satuan pendidikan untuk TK/RA terjangkau oleh masyarakat



b. Angka Partisipasi Murni (APM)

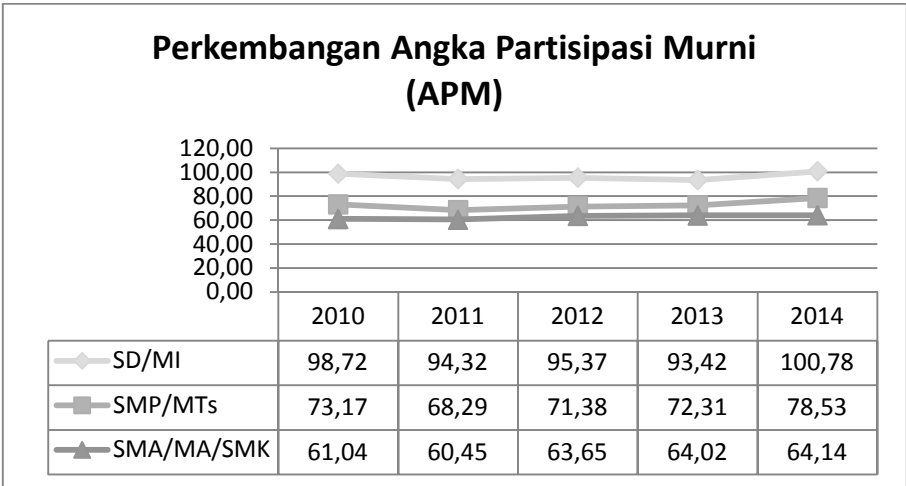
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target APM yang ditetapkan pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 95,90%, SMP/MTs sebesar 73,78% dan SMA/MA/SMK sebesar 65,90%. Target ini apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dimana pada saat itu untuk SD/MI sebesar 95,37%, SMP/MTs sebesar 71,34% dan SMA/MA/SMK sebesar 63,65%.

Peningkatan target ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Realisasi APM yang dicapai pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 100,78%, SMP/MTs sebesar 78,53% dan SMA/MA/SMK sebesar 64,14%. Sedangkan realisasi APM yang dicapai pada tahun 2013 untuk SD/MI sebesar 93,42%, SMP/MTs sebesar 72,31% dan SMA/MA/SMK sebesar 64,02%.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun terakhir pada masing-masing jenjang pendidikan terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.1.1



Sumber data: Dinas Pendidikan



Terbaca pada Matrik Pencapaian APM dikarenakan sebagian peserta didik jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK memilih sekolah di luar wilayah Sidoarjo dan ke pondok pesantren.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

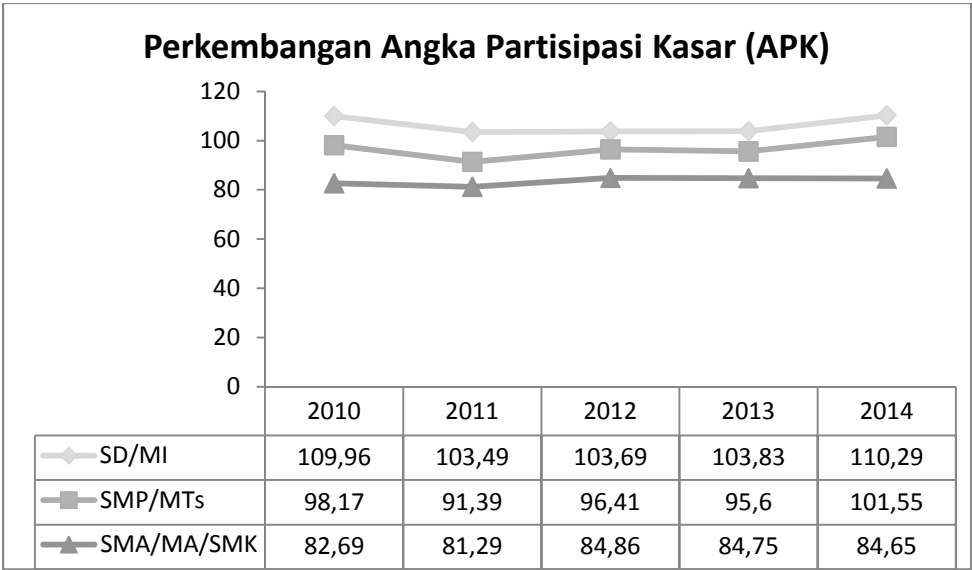
Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2014, SD/MI sebesar 103,89%, SMP/MTs sebesar 97,27% dan SMA/MA/SMK sebesar 86,02%.

Sedangkan realisasi APK yang dicapai pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 110,29%, SMP/MTs sebesar 101,55% dan SMA/MA/SMK sebesar 84,65%. Jika dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2013, SD/MI sebesar 103,83%, SMP/MTs sebesar 95,60% dan SMA/MA/SMK sebesar 84,75% maka terjadi penurunan pada jenjang SMA/MA/SMK.

Hal tersebut dikarenakan sebagian peserta didik jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK memilih sekolah di luar wilayah Sidoarjo.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan selama tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut:

Grafik III.1.2



Sumber Data: Dinas Pendidikan



1.1. Prosentase Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah angka (jumlah peserta didik) putus sekolah per 100 peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

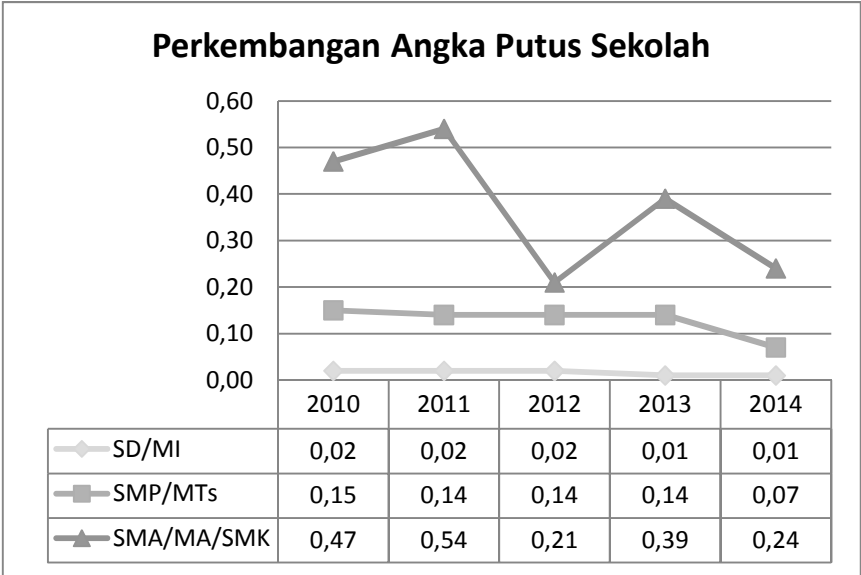
Target yang ditetapkan untuk APS tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 0,02%, SMP/MTs sebesar 0,13% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,175%.

Realisasi APS pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,07% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,24%. Sedangkan realisasi tahun 2013 untuk SD/MI menurun sebesar 0,01%, SMP/MTs tetap sebesar 0,14% dan SMA/MA/SMK meningkat menjadi sebesar 0,39%.

Secara garis besar terjadi penurunan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan, dan seluruhnya masih pada tingkat cukup baik karena masih dibawah 0,50%.

Perkembangan angka putus sekolah dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik III.1.3



Sumber data : Dinas Pendidikan

1.2. Angka Melek Huruf Usia Diatas 15 Tahun

Pada tahun 2014, penduduk Sidoarjo usia di atas 15 tahun berjumlah 1.214.420 jiwa; sebanyak 1.214.093 orang atau sekitar 99,97 % telah melek huruf. Dengan demikian masih tersisa 0,03 % penduduk yang perlu dientaskan dari buta huruf khususnya penduduk yang berusia di atas usia produktif (lebih dari 45 tahun).



1.3. Prosentase angka kelulusan sekolah

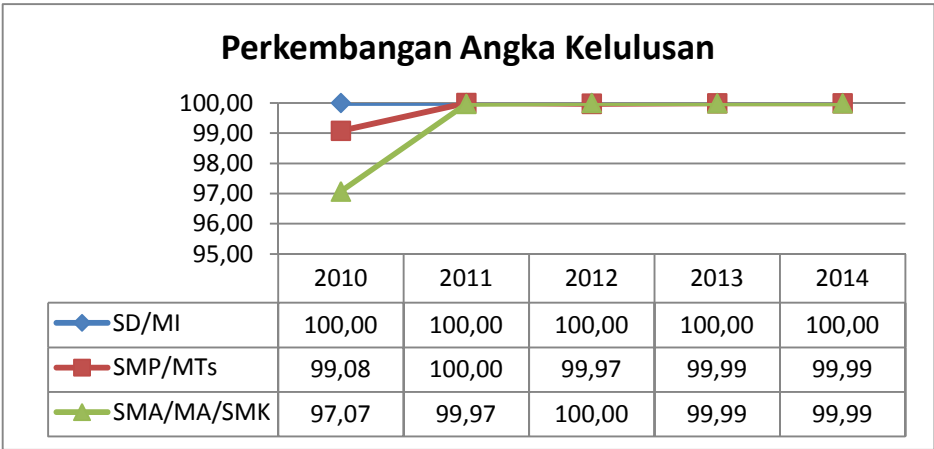
Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten diukur dengan angka kelulusan. Kemampuan sekolah untuk meluluskan anak didiknya akan berbanding lurus dengan kualitas tersebut.

Target yang ditetapkan untuk angka kelulusan tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 100% SMP/MTs sebesar 100% sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 100%.

Realisasi Angka kelulusan sekolah pada tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 99,99%, sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 99,99%, angka kelulusan pada semua jenjang dapat dikatakan cukup baik.

Perkembangan Angka Kelulusan selama lima tahun, sebagaimana tergambar dalam grafis berikut.

Grafik III.1.4



Sumber Data : Dinas Pendidikan

1.1. Peningkatan Jumlah Pendidik yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti, untuk itu para pendidik wajib terus memperbarui wawasannya agar dapat memberikan transfer pengetahuan yang layak kepada peserta didik. Sampai dengan tahun 2014 sudah 14,943 pendidik telah memiliki pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi (D4/S1) dari jumlah semua pendidik 20,841 orang. Masih terdapat 5,898 pendidik yang sedang menempuh dan yang belum menempuh D4/S1. Sedangkan pendidik



telah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2013 sebanyak 13,356 dari Jumlah guru 18,420 pendidik.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kesehatan dengan Perangkat Puskesmasnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2.1 Angka kematian bayi

Untuk menilai hasil dari pelayanan kesehatan terhadap bayi dan anak balita dilakukan melalui beberapa standar pelayanan kepada bayi dan anak balita.

Angka kematian bayi yang ditargetkan tahun 2014 adalah sebesar < 13 per 1.000 kelahiran hidup.

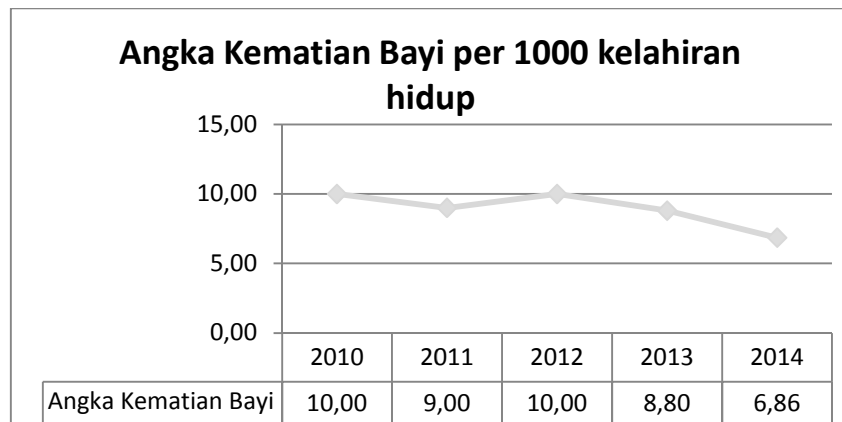
Realisasi angka kematian bayi pada tahun 2014 adalah sebesar 6,86 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dari kejadian tahun 2013 sebesar 8,80 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian bayi dikarenakan ketrampilan dan pengetahuan tentang tata laksana penanganan gawat darurat bayi sudah cukup optimal selain juga karena kesadaran para ibu hamil untuk selalu memeriksakan kandungannya pada bidan Puskesmas setempat dan atau pada fasilitas kesehatan ibu dan anak lainnya, sehingga kesehatan ibu dan anak dalam kandungan selalu terjaga dan lahirpun dalam keadaan baik dan selamat baik ibu maupun anak yang dilahirkannya.

Kematian bayi khususnya masa neonatal disebabkan oleh BBLR (Berat Bayi lahir Rendah); Keadaan ini terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain dari faktor ibu dan janin itu sendiri, yang akhirnya menghambat pertumbuhan hasil konsepsi dan atau merangsang terjadinya persalinan sebelum waktunya.

Perkembangan angka kematian bayi sampai dengan 2014 terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik III.2.1



Sumber data : Dinas Kesehatan

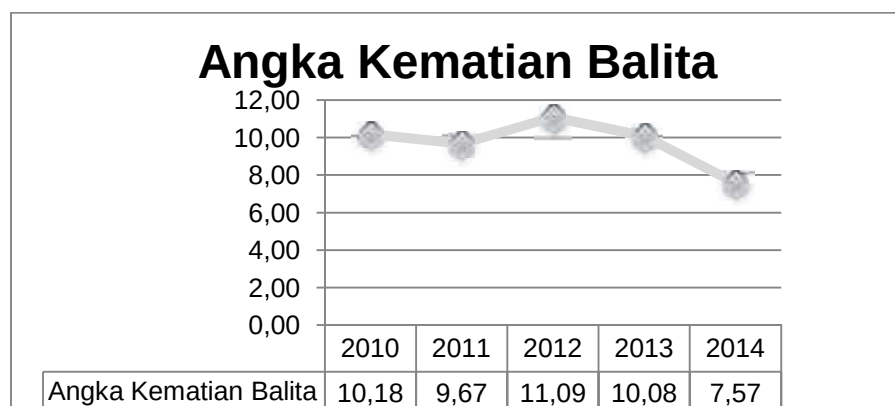
Beberapa Upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian bayi adalah :

- ✓ Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen BBLR, asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- ✓ Adanya rujukan dini terencana;
- ✓ Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan

2.1.1 Angka Kematian Anak Balita

Angka Nasional untuk angka kematian anak balita sebesar < 46 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan angka kematian anak balita di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2.2



Sumber data: Dinas Kesehatan



Realisasi angka kematian balita pada tahun 2014 adalah sebesar 7,57 per 1000 kelahiran hidup menurun dari realisasi tahun 2013 yang sebesar 10,08 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian Balita seperti tersebut diatas sangat baik apabila dibandingkan dengan target RPJMD dan atau target Indonesia Sehat 2015 sebesar < 46 per 1000 kelahiran hidup.

Kematian Balita terbanyak karena *Gastro Enteritis Acute (diare)*.

Menurunnya angka kematian balita pada tahun 2014 disebabkan antara lain karena meningkatnya pelaksanaan PHBS di masyarakat serta upaya deteksi tumbang pelaksanaan pemantapan ketrampilan manajemen terpadu balita sakit di fasilitas pelayanan kesehatan.

2.1.2 Angka kematian ibu

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Target angka kematian ibu tahun 2014 sebesar < 89 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu tahun 2014 sebesar **80,02** per 100.000 kelahiran hidup, Angka ini masih lebih baik apabila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 112 per 100.000 kelahiran hidup. Peningkatan ini dikarenakan 4 Terlambat yaitu :

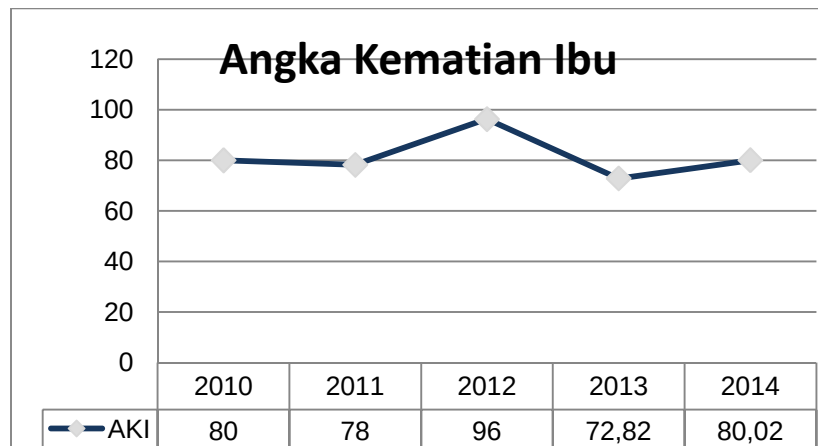
- Terlambat mendeteksi dan ambil keputusan
- Terlambat melakukan rujukan
- Terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan

Kasus kematian ibu terbanyak pada tahun 2014 karena :

- Preeklamsia sebesar 42,46%
- Perdarahan sebesar 25%
- Lainnya karena infeksi, jantung emboli, HIV, Tb, Hepatitis sebesar 32,14%

Perkembangan angka kematian ibu sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2.3



Sumber data : Dinas Kesehatan

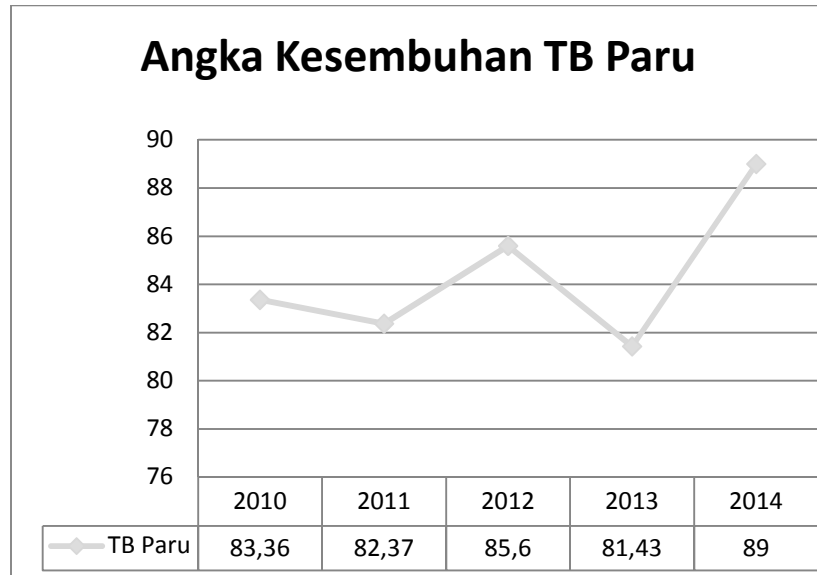
Upaya – upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (ANC terpadu)
- Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN(Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu hamil guna memantau kesehatan ibu hamil
- Refreshing deteksi dini oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi Desa dengan P4K (perencanaan persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K.
- Melakukan skill asseement pada gawat darurat maternal dengan sasaran tenaga kesehatan
- Optimalisasi system rujukan : sms gateway, SIJARIEMAS, termasuk rujukan didni terencana
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah

a. Angka Kesembuhan TB Paru

Perkembangan angka kesembuhan TB paru sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2.4



Sumber data: Dinas Kesehatan

Target angka kesembuhan TB Paru tahun 2014 adalah sebesar >85%. Angka kesembuhan TB Paru (*cure rate*) selama tahun 2014 tercapai sebesar 89,00%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2013 yang tercapai 81,43%. Jika dilihat dari angka kesuksesan (*Success rate*) TB Paru yaitu persentase penderita TB Paru yang telah selesai pengobatan, sudah mencapai 103,6%. Angka kesembuhan dapat dicapai apabila penderita yang sudah menyelesaikan pengobatan melaksanakan pemeriksaan dahak/sputum pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan sebagai dasar evaluasi.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka kesembuhan TB Paru, antara lain :

1. Ketersediaan dan pemberian obat yang adekuat;
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku penderita terhadap program strategi DOTS;
3. Meningkatkan dukungan dan pengawasan keluarga / kader PMO;
4. Pemberian PMT bagi penderita TB secara gratis;
5. Faktor keluarga meliputi dukungan dan pengawasan, terhadap program;



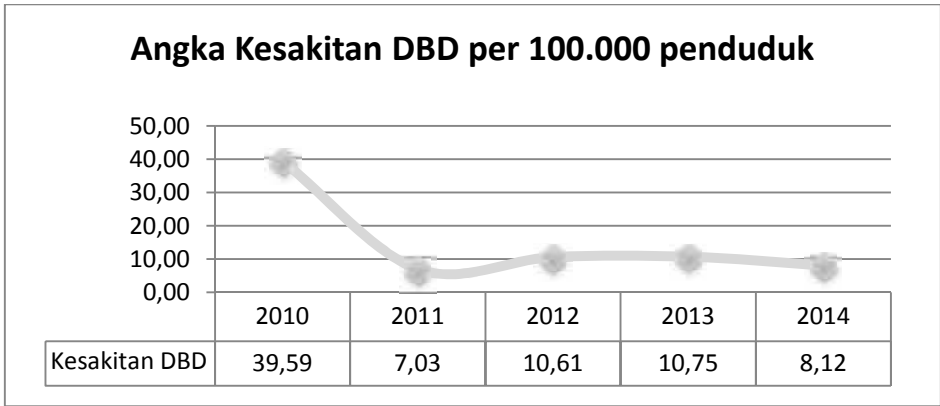
- 6. Pengobatan TB secara gratis baik di sarana pelayanan tingkat dasar sampai lanjutan;
- 7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan TB paru secara berkala;

1. Angka Kesakitan DBD

Target angka kesakitan DBD tahun 2014 adalah sebesar < 52 per 100.000 penduduk.

Perkembangan angka kesakitan DBD sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2.5



Sumber data: Dinas Kesehatan

Angka kesakitan DBD Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi. Angka kesakitan DBD pada tahun 2014 sebesar 8,12 per 100.000 penduduk, menurun jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 10,75 per 100.000 penduduk, namun demikian angka tersebut sudah sangat jauh atau sangat berhasil melampaui dari target yang ditetapkan.

Beberapa Penyebab mengapa kasus DBD tetap ada karena :

- Perantara Nyamuk Aedes Aegypti masih ada
- Pemahaman tentang PSN belum sepenuhnya benar
- Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan
- Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan masih dominan dengan cara pengasapan.



Kabupaten Sidoarjo punya potensi sebagai wilayah endemis DBD dimana tingkat penularan DBD sangat tinggi, yang dipengaruhi antara lain curah hujan dan mobilitas penduduk yang tinggi, disertai masalah kebersihan lingkungan.

Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup efektif untuk mencegah penularan DBD, sehingga penyebarannya dapat ditekan serendah mungkin. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten antara lain :

- Mengkoordinasi juru pemantau jentik (Jumantik) untuk melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)
- Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di sekitarnya melakukan gerakan 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur serta Mencegah Gigitan Nyamuk)
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga masyarakat dapat mencegah secara dini DBD serta meningkatkan intensitas kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN
- Penanggulangan focus penderita DBD melalui *fogging* (penyemprotan)
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

2.1.3 Balita dengan Gizi Buruk

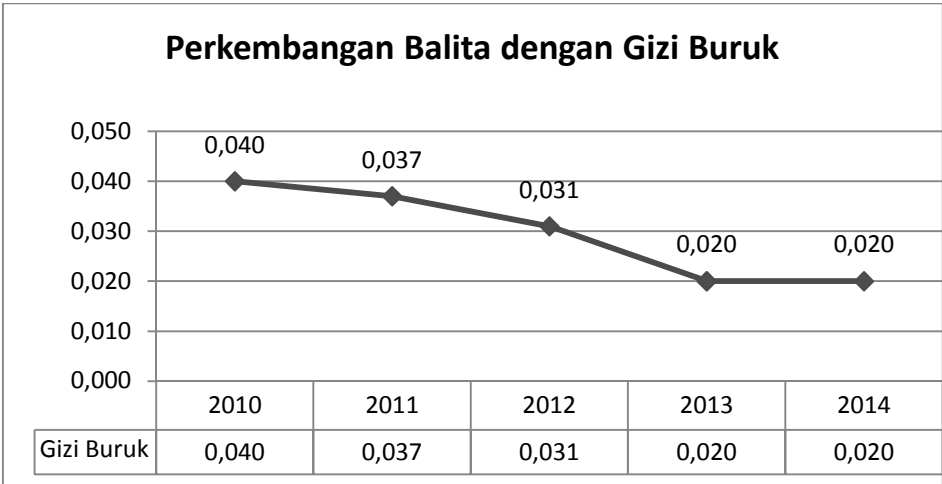
Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi yang didasarkan pada indeks menurut panjang badan atau tinggi badan dengan Z score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmur*, *kwashiorkor*, *marasmus kwashiorkor*).

Target balita dengan gizi buruk setiap tahunnya adalah sebesar < 1% dari jumlah yang diperiksa/ditimbang. Pada tahun 2014, prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,02%.

Perkembangan balita gizi buruk terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik III.2.6



Sumber data: Dinas Kesehatan

Jumlah balita gizi buruk semakin menurun. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi balita gizi buruk, antara lain :

1. Memotivasi masyarakat secara terus menerus dengan kerja sama lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan;
2. Membentuk Pos Gizi (kegiatan praktek perilaku pemulihan gizi) melalui pendekatan Positive Deviance (Penyimpangan Positif yaitu dengan mengadap perilaku berbeda/unik dari masyarakat kurang mampu tetapi mempunyai balita dengan status gizi yang baik);
3. Dukungan pemerintah melalui intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.

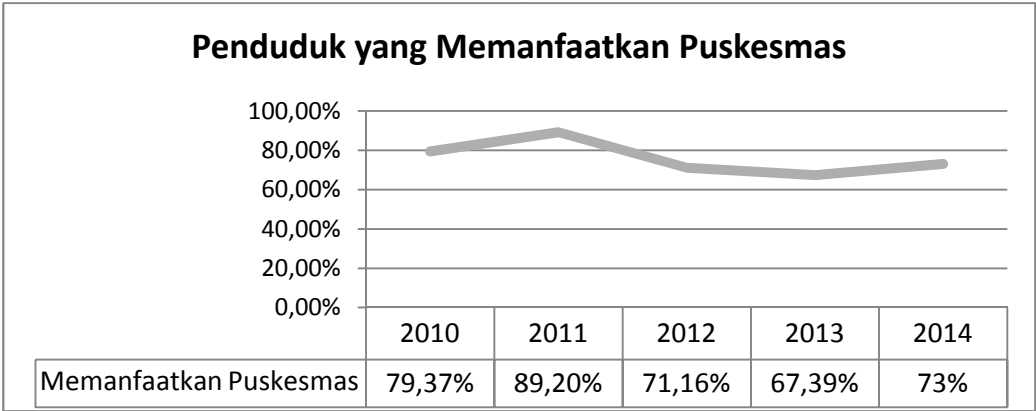
2.1.4 Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

Untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka perlu diukur tingkat animo masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas yang ada. *Visit rate* menunjukkan gambaran kunjungan Puskesmas yaitu rawat inap dan rawat jalan yang meliputi BP, BP gigi, KIA, UGD, Poli Lansia, pemeriksaan penunjang, keterangan surat sehat, pemeriksaan haji. Target jumlah penduduk yang memanfaatkan puskesmas (*visit rate*) ditetapkan sebesar 60% dari seluruh jumlah penduduk. Realisasi kunjungan ke Puskesmas tahun 2014 tercapai sebesar 73,89 %. Sebagai



pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas menitikberatkan pada pelayanan preventif (pencegahan), promotif, kuratif (pengobatan dasar) dan rehabilitatif (pemulihan). Peningkatan ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik.

Grafik III.2.7



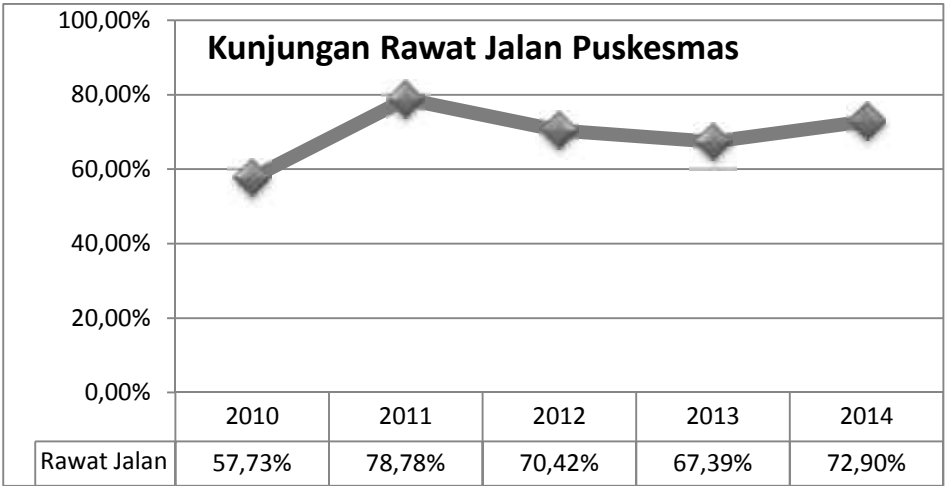
Sumber data : Dinas Kesehatan

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas mengalami kenaikan di bandingkan dengan tahun 2013.

a. Persentase kunjungan rawat jalan

Persentase kunjungan rawat jalan di Puskesmas tahun 2014 sebesar 72,9% meningkat jika dibandingkan dengan dari realisasi tahun 2013 sebesar 67,39% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan kunjungan rawat jalan di Puskesmas sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.2.8



Sumber data : Dinas Kesehatan

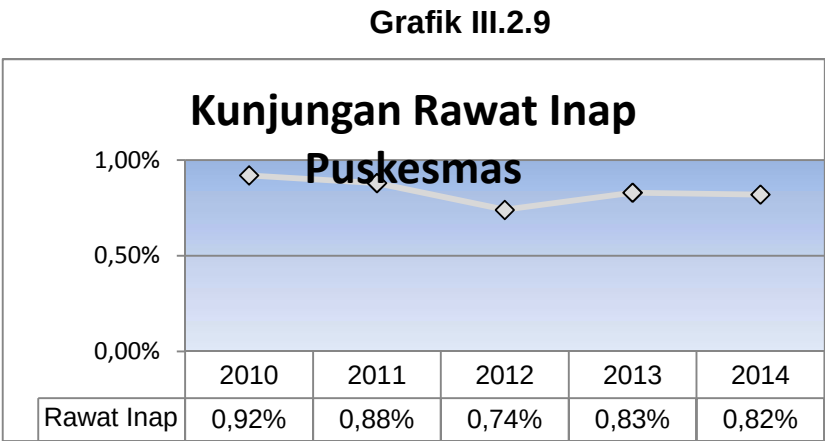


b. Persentase kunjungan rawat inap

Persentase kunjungan rawat inap di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi terhadap target sebesar 1,50% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo.

Persentase kunjungan rawat inap di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,82% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan prosentase kunjungan rawat inap di Puskesmas ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber Data : Dinas Kesehatan

Capaian kunjungan rawat inap di Puskesmas tahun 2014 sebesar 0,82%. dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,83%. Pelayanan rawat inap di Puskesmas hanya pelayanan kesehatan dasar dimana kegiatan pokok di Puskesmas diutamakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif.

2.1.5 Cakupan Desa dengan Universal Child Immunization (UCI)

Desa yang termasuk dalam cakupan UCI mencerminkan tingginya cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi di desa tersebut. Pada tahun 2014, dari 353 desa/kelurahan yang ada, terdapat 349 desa/kelurahan atau 98,87% yang telah masuk dalam kriteria desa UCI. Yang belum masuk kriteria desa UCI yaitu wilayah Puskesmas Tanggulangin : Desa Kedungbendo dan wilayah Puskesmas Porong : Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring. Hal tersebut dikarenakan sasaran dari 4 desa tersebut tidak ada ditempat karena desanya tenggelam oleh lumpur



Lapindo. Capaian desa UI tersebut menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan tahun 2013 dimana desa yang mencapai UCI mencapai 345 desa (97,17%).

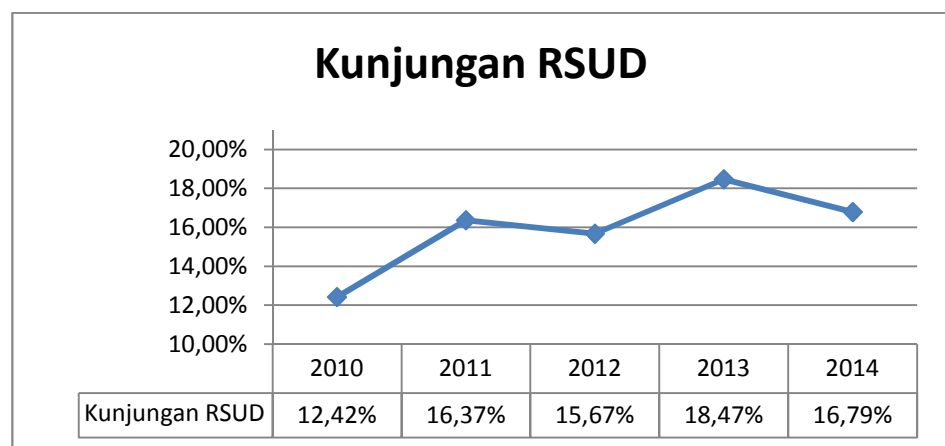
2.1.6 Ratio penduduk yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Sidoarjo

Untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka perlu diukur tingkat animo masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Target Nasional untuk kunjungan RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,5% dari jumlah penduduk, sebagaimana dalam indikator Indonesia Sehat 2015.

Jumlah kunjungan ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sebanyak 386.308 pengunjung dan tahun 2014 sebanyak 357.388 pengunjung. Sehingga prosentase kunjungan dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 yang sebesar 2.090.619 jiwa adalah 18,47% dan tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.127.348 jiwa diperoleh rasio sebesar 16,79%

Grafik III.2.10



Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2014 terjadi penurunan rasio jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD. Hal ini dikarenakan :

1. Tahun 2014 adalah tahun transisi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)



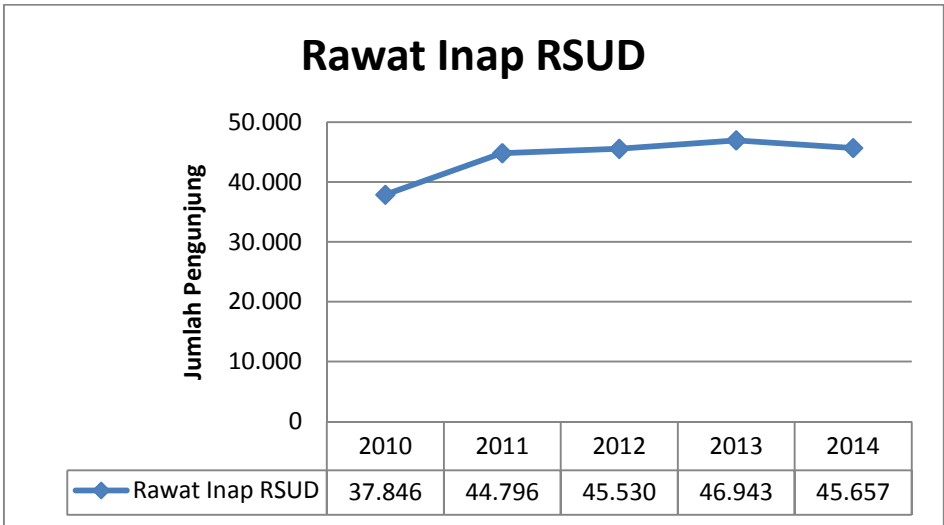
2. Banyak RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan di banyak pilihan rumah sakit. Sementara pada tahun 2013, peserta Askes hanya dilayani di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Namun demikian jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah melampaui standar nasional. Kondisi tersebut tergambar lebih lanjut dalam beberapa indikator yang mendukung sebagai berikut :

a. Jumlah Kunjungan Rawat Inap

Perkembangan jumlah kunjungan rawat inap pada RSUD terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.2.11



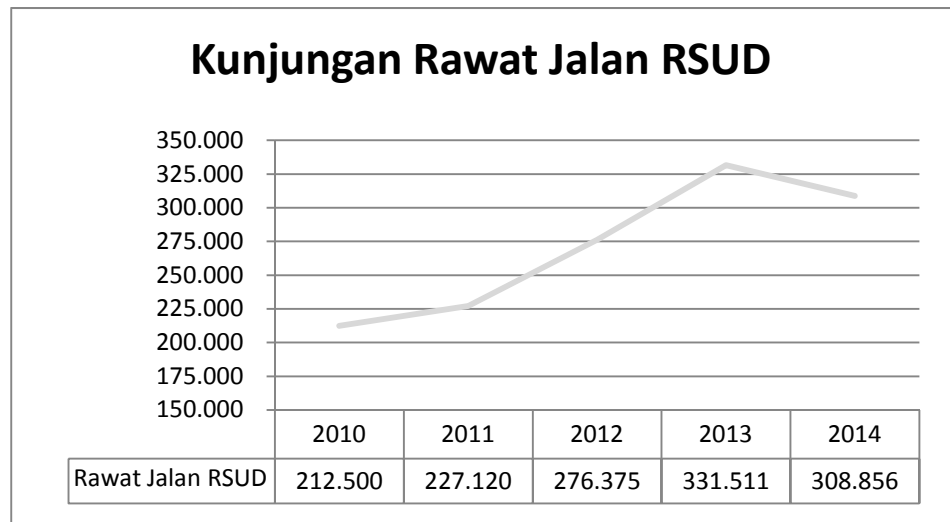
Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari data Realisasi kunjungan rawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebanyak 45.657 pasien dari target yang ditetapkan sebanyak 38.571 pasien. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2013 dengan kunjungan rawat inap sebanyak 46.943 pasien dari target yang ditetapkan sebanyak 36.302 pasien. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat mempunyai pilihan rumah sakit tujuan lebih banyak.

b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

Perkembangan jumlah kunjungan rawat jalan pada RSUD Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2.12



Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah kunjungan rawat jalan di RSUD Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun sebenarnya selalu meningkat, namun di tahun 2014 turun menjadi sebanyak 308.856 pasien dari capaian tahun 2013, walaupun target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sebesar 241.320 pasien telah terlampaui.

Hal ini dikarenakan banyak rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Selain itu di rumah sakit lain tersedia poli yang buka di sore hari sehingga pasien pekerja banyak memilih Periksa Sore. Walaupun di RSUD Kabupaten Sidoarjo ada Poli Eksekutif yang mulai beroperasi pada bulan April 2014, namun perkembangannya masih belum optimal.



3. Urusan Lingkungan Hidup

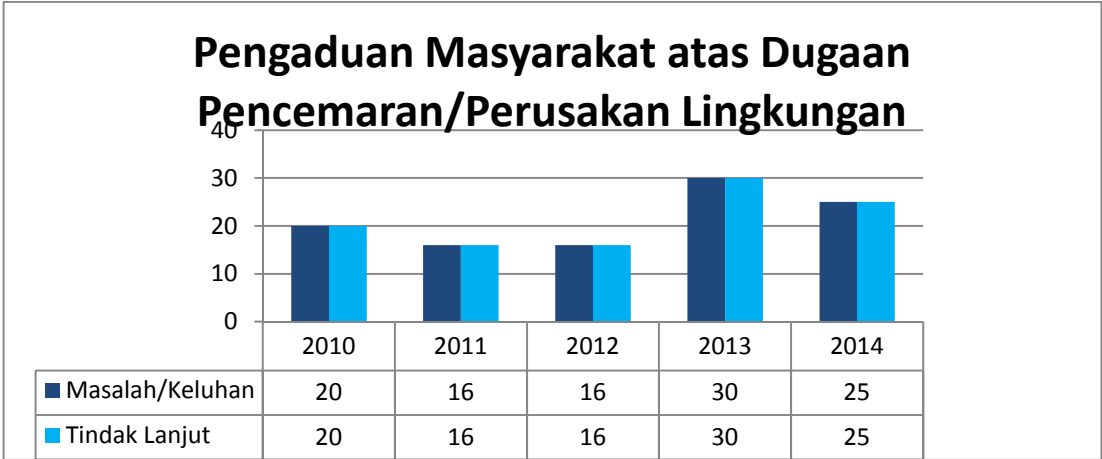
Urusan Lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pasar.

1. Pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan di dorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Perkembangan jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dan tindak lanjutnya selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik III.3.1



Sumber : Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, 2014

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup sebanyak 25 permasalahan/keluhan dan seluruhnya atau 100% sudah ditindaklanjuti.



1. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil ditangani Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang tertangani berarti polusi yang diakibatkan oleh sampah semakin berkurang yaitu sampah yang dibuang ke sembarang tempat oleh masyarakat semakin berkurang sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir khususnya di wilayah padat penduduk.

Perkembangan sampah yang tertangani hingga tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3.1
Perbandingan Jumlah Sampah Yang Terangkut
dengan Jumlah Produksi Sampah Tahun 2010 s.d 2014

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah sampah yang terangkut	M3/hari	802	810	820	802	924
Jumlah produksi sampah	M3/hari	4.043	4.421	4.517	4.517	4.517
Prosentase jumlah sampah terangkut	%	19,84	18,32	18,15	17.76	20,46

Sumber Data: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Realisasi jumlah sampah yang terangkut ke TPA tahun 2014 sebanyak 924 m3/hari. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah sampah yang terangkut sebanyak 122 m³/hari atau 15,21%. Realisasi ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah / armada angkutan sampah dan sarana prasarana pengelolaan sampah dapat menambah jumlah sampah yang tertangani.

Upaya yang dilakukan untuk penanganan sampah yang tidak terangkut dan mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

- Menambah jumlah angkutan sampah
- Menambah sarana prasarana pengelolaan sampah
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menglola sampah mulai dari rumah tangga sampai tingkat komunal melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan



- Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat baik melalui konvensional maupun pengolahan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Di TPST ini kelompok masyarakat yang peduli akan sampah dapat melakukan pemilahan sampah sehingga sampah organik / basah dapat dijadikan kompos, sampah organik yang mempunyai nilai jual dapat dijual ke bank sampah atau didaur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai jual, sedangkan sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dibuang ke TPA, dengan demikian sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang jumlahnya. Sampai dengan saat ini terdapat 25 lokasi TPST yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- Desa Janti, Kecamatan Waru
- Desa Ngingas, Kecamatan Waru
- Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan
- Desa Siwalananji, Kecamatan Buduran
- Desa Prasung, Kecamatan Buduran
- Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin
- Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan
- Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan
- Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan
- Desa Jimbarankulon, Kecamatan Wonoayu
- Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo
- Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo
- Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran
- Desa Dukuhtengan, Kecamatan Buduran
- Desa Damarsi, Kecamatan Buduran
- Desa Sawohan, Kecamatan Buduran
- Desa Kragan, Kecamatan Gedangan
- Desa Tebel, Kecamatan Gedangan
- Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru
- Desa Buncitan, Kecamatan Sedati
- Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo
- Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin



- Desa Kraton, Kecamatan Krian
- Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo
- Desa Sempang, Kecamatan Prambon

Persentase Pedagang yang menempati pasar

Pasar merupakan Pasar Daerah / Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dimana Jumlah Pasar yang dikelola sebanyak 18 unit Pasar yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

Penyediaan Pasar Daerah dimaksud merupakan salah satu dari pelayanan urusan perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan dinas teknis pengelolanya adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai dinas teknis Dinas Pasar diberikan amanah untuk menyediakan pelayanan pasar, adapun indikator kinerja Pelayanan Pasar yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015 adalah “Prosentase pedagang yang menempati pasar”. Maksud dari indikator tersebut adalah tersedianya fasilitas tempat berdagang bagi pedagang yang menempati pasar.

Adapun fasilitas pelayanan pasar yang disediakan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar adalah, antara lain : Toko Gudang (Togu/Ruko), Kios, Los, dan Fasilitas Lainnya yang disediakan untuk berdagang di Pasar. Dari fasilitas yang tersedia tersebut, perkembangan kapasitas pasar dapat disampaikan sebagaimana grafik di bawah ini :



Sumber Data : Dinas Pasar



Dari grafik tersebut di atas, bahwa kapasitas stand pasar yang disediakan selalu meningkat dari tahun ke tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mencapai 13.881 stand pasar.

Sampai tahun 2014 stand pasar yang disediakan memang belum mampu melayani seluruh kebutuhan perkembangan pedagang yang menempati pasar, adapun perbandingan perkembangan jumlah stand pasar dengan jumlah pedagang adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III.3.2

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kapasitas Pasar	13.178	13.609	13.855	13.881	13.881
2	Jumlah pedagang	17.411	14.842	15.088	15229	15.220
3	Jumlah pedagang yang menempati stan yang disediakan	8.538	8.969	9.322	9.436	10.060
4	Jumlah stan tutup	4.640	4.640	4.533	4.549	3.821
5	Jumlah pedagang lesehan	1.233	1.233	1.233	1.244	1.339

Sumber Data : Dinas Pasar

Dari tabel tersebut diatas, bahwa perkembangan jumlah pedagang memang lebih tinggi dari jumlah penyediaan fasilitas stand pasar, dimana masih terdapat 1.339 pedagang belum tertampung dalam bangunan stand pasar, dan masih berjualan dengan cara lesehan di halaman pasar.

Meskipun dengan cara berjualan lesehan masih diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku, tetapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berusaha penampungannya ketempat yang selayaknya dan direncanakan mengembangkan Pasar-Pasar yang secara kelayakan dapat dikembangkan. Pasar-pasar dimaksud antara lain : Pasar Taman, Pasar Tulangan, Pasar Wadungasri, dan Pasar Prambon.

Yang juga perlu mendapat perhatian dari kondisi pasar tersebut adalah masih banyaknya kondisi stand pasar yang tutup, yaitu kurang lebih terdapat 3.821 pedagang, hal ini berdasarkan pendataan alasan yang disampaikan adalah lokasi stand yang kurang strategis, tetapi dengan pembinaan yang dilakukan secara intensif, maka jumlah stand pasar yang tutup dari tahun ketahun semakin menurun, dimana pada tahun 2013 yang



tutup sebesar 4.549 stand dan pada tahun 2014 menurun menjadi 3.821 stand.

4. Urusan Pekerjaan Umum

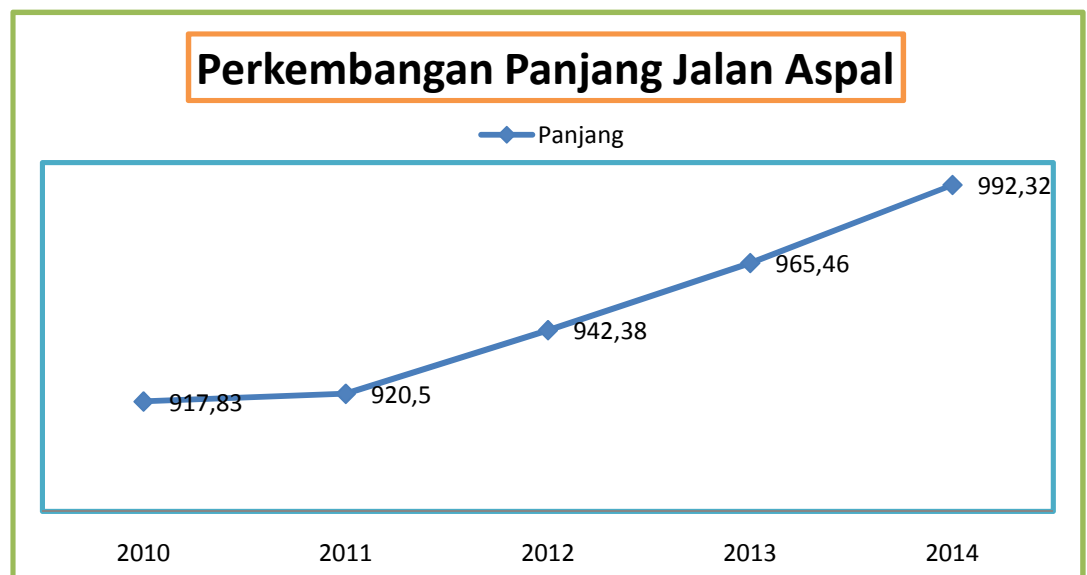
Urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Pengairan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat.

Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti dalam tabel berikut :

GrafikIII.4.1



Sumber data : Dinas PU Bina Marga



Dari seluruh jalan yang ada tersebut kondisinya sebagai berikut :

	KETERANGAN	BASELINE RPJMD TAHUN 2010	REALISASI KINERJA THN 2011	REALISASI KINERJA THN 2012	REALISASI KINERJA THN 2013	REALISASI KINERJA THN 2014	DIBANDING THN 2013	
							NAIK (+) TURUN (-)	%
1	Jalan aspal dengan kondisi baik	481,29	712,8	824,96	788,03	812,68	24,65	3,13%
2	Jalan aspal dengan kondisi sedang	301,98	65,5	31,95	111,25	95,41	-15,84	-14,24%
3	Jalan aspal dengan kondisi rusak	134,56	142,2	85,47	66,18	84,23	18,05	27,27%
	PanjangJalan	917,83	920,5	942,38	965,46	992,32	26,86	2,78%

Sumber Data: Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan dengan kondisi baik tahun 2014 bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 terjadi peningkatan sepanjang 24,65 km atau 3,13%, kondisi jalan sedang terjadi penurunan 15,84 km atau 14,24%, sedangkan jalan dalam kondisi rusak meningkat 18,05 km atau 27,27%. artinya bahwa hal tersebut disebabkan :

- 1) Meningkatnya jumlah kendaraan bertonase berat melintasi jalan Kabupaten yang tidak sesuai kelasnya;
- 2) Genangan air akibat anomali cuaca mempercepat kerusakan jalan pada ruas jalan yang belum dilengkapi saluran tepi (drainase jalan);
- 3) Kerusakan Jalan pada kondisi sedang yang belum tertangani sesuai tingkat kerusakan di tahun 2014 meningkat menjadi kondisi rusak.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi baik antara lain:

- 1) Meningkatkan jumlah pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
- 2) Mengevaluasi penyebab kerusakan jalan agar masa mendatang faktor penyebab kerusakan jalan dapat diminimalisir, sehingga kerusakan jalan dapat dikurangi;
- 3) Mengajukan usulan penanganan jalan Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar bisa diberikan Bantuan Keuangan.



Namun demikian secara keseluruhan panjang jalan beraspal apabila dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2014 yaitu panjang yang terbangun/beraspal 992,32km berarti terjadi pelampauan target sepanjang 26,86 km atau 2,78%.

Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur di beberapa wilayah, Pembangunan jalan dan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Jalan, yang pada tahun 2013 hanya bertambah 6,34 km sedangkan yang dilakukan pada tahun 2014 bertambah sepanjang 26,85 Km diantaranya adalah :
 - a) Pembangunan jalan Desa Pejangkungan – Kecamatan Prambon
 - b) Pembangunan jalan Bangsri – Kecamatan Sukodono
 - c) Pembangunan jalan tanggul afvour Desa Durung banjar - Kecamatan Candi
 - d) Pembangunan jalan depan PT. Surya Pacific (frontage road)
 - e) Pembangunan jalan depan perumahan Puri Surya Jaya (frontage road)
 - f) Pembangunan jalan wonokasian – Sumberrejo Kecamatan Wonoayu
 - g) Pembangunan jalan Desa Suruh Kecamatan Sukodono
 - h) Pembangunan jalan Jeruk legi Kecamatan Krian
 - i) Pembangunan jalan Pagerngumbuk – Candinegoro Kecamatan Wonoayu
 - j) Pembangunan jalan Kedungsukodani – Kecamatan Balongbendo
 - k) Pembangunan jalan Penambangan – Kecamatan Balongbendo
 - l) Pembangunan jalan Desa Bulang – Desa Cangkring Kecamatan Prambon
 - m) Pembangunan jalan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran
- b. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan berkala maupun pemeliharaan rutin jalan pada tahun 2013 dilakukan sepanjang 526,64 km, sedangkan pada tahun 2014 dilaksanakan sepanjang 346,45 km, diantaranya pada lokasi sebagai berikut :
 - a) Pemeliharaan jalan Tanggulangin – Tulangan Kecamatan Tanggulangin



- b) Pemeliharaan jalan Candinegoro – Kemasan Kecamatan Krian
- c) Pemeliharaan jalan Tulangan – Kedondong Kecamatan Tulangan
- d) Pemeliharaan jalan Watutulis – Gagangkepuhsari Kecamatan Tarik
- e) Pemeliharaan jalan Keboguyang – Permisan Kecamatan Jabon
- f) Pemeliharaan jalan Porong – Krembung Kecamatan Porong
- g) Pemeliharaan jalan Buduran – Sarirogo Kecamatan Buduran
- h) Pemeliharaan jalan Gelam – Kalipecabean Kecamatan Candi
- i) Pemeliharaan jalan Gedangan – Betro Kecamatan Gedangan
- j) Pemeliharaan jalan Jedong cangkring – Wono plintahan Kecamatan Prambon

Penurunan panjang jalan dengan kondisi rusak dan upaya mempertahankan jalan dalam kondisi beraspal sedang dilakukan dengan kegiatan :

- Pembangunan/Peningkatan jalan
- Pemeliharaan berkala jalan
- Pemeliharaan rutin jalan

Dalam hal penanganan jembatan jumlah total bangunan jembatan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 376 Jembatan yang terbangun pada daerah yang secara teknis memerlukan pembangunan jembatan.

Pada tahun 2014 terdapat kegiatan peningkatan jembatan dimana terdapat 4 (empat) jembatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan dalam 2 (dua) tahun anggaran (tahun 2013 dan tahun 2014) :

- a. Jembatan Gisik Cemandi di Kecamatan Sedati
- b. Jembatan Wonocolo di Kecamatan Taman
- c. Jembatan Kedung Cangkring di Kecamatan Jabon
- d. Jembatan Pagerwojo di Kecamatan Buduran

Dalam tahun 2014 terdapat kegiatan pembangunan jembatan baru sebanyak 6 (enam) jembatan yaitu :

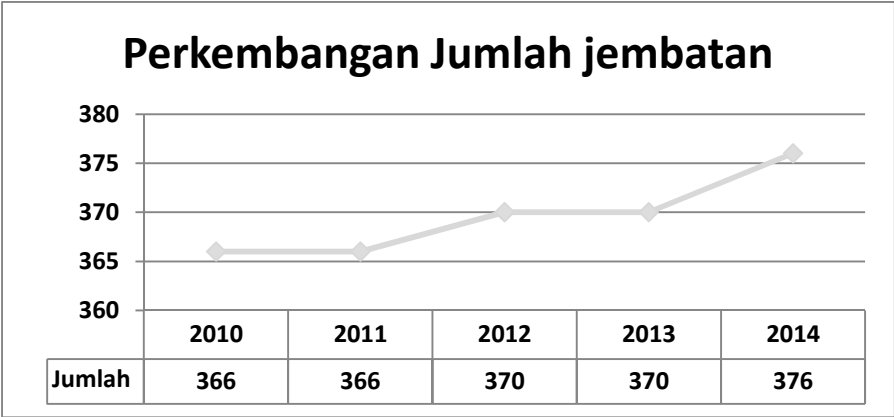
- 1) Pembangunan jembatan di desa Balonggabus kecamatan Candi dengan panjang bentangan 12,75 m
- 2) Pembangunan jembatan di desa Tlasi RT.5 RW.1 kecamatan Tulangan dengan panjang bentangan 9 m



- 3) Pembangunan jembatan di desa wonomlati RT.4 RW.2 kecamatan Krembung dengan panjang bentangan 3 m
- 4) Pembangunan jembatan di desa janti RT.2 RW.1 kecamatan Tulangan dengan panjang bentangan 10,50 m
- 5) Pembangunan jembatan di desa jati alun-alun kecamatan Prambon dengan panjang bentangan 11 m
- 6) Pembangunan jembatan di desa suko RT. RW. Kecamatan Sukodono dengan panjang bentangan 8 m

Dari seluruh jembatan yang ada tersebut kondisi yang ada sebagai berikut :

Grafik III.4.2



Sumber Data : Dinas PU Bina Marga

NO	KONDISI JEMBATAN	THN 2010	THN 2011	THN 2012	THN 2013	THN 2014
1	Jembatan dengan kondisi baik	-	358	355	355	361
2	Jembatan dengan kondisi sedang	-	5	8	10	9
3	Jembatan dengan kondisi rusak	-	3	7	5	6
4	Meningkatnya jumlah jembatan terbangun	366	366	370	370	376

Sumber data : Dinas PU Bina Marga

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 jumlah jembatan kondisi baik pada tahun 2014 meningkat yaitu menjadi 361 jembatan, jembatan dalam kondisi sedang menurun 1 jembatan menjadi 9 jembatan, dalam



kondisi rusak meningkat 1 jembatan dari 5 jembatan menjadi 6 jembatan, hal tersebut dikarenakan banyaknya kendaraan bertonase berat yang melintas pada ruas jalan kabupaten yang tidak sesuai kelasnya sehingga akan mempercepat kerusakan jembatan sebelum umur teknisnya.

Target RPJMD jembatan yang terbangun tahun 2014 ditargetkan sebanyak 372 jembatan, sehingga tahun 2014 jembatan terbangun sudah melampaui dari target RPJMD nya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga target dapat tercapai adalah:

- Menetapkan target sesuai alokasi dana yang tersedia
- Mengalokasikan dana khusus untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan yang sudah baik agar tidak menurun kondisinya ataupun menjadi rusak

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam hal target tidak tercapai:

- Mengevaluasi penetapan kinerja yang ada apakah telah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia
- Mengevaluasi penentuan biaya, apakah sudah sesuai dengan harga pasar, baik material maupun upah kerja dan sewa alat
- Mengevaluasi volume kerusakan jalan, apakah dalam jangka waktu dilaksanakannya survey sampai dengan dimulainya pekerjaan, kerusakan bertambah.
- Mengevaluasi penyebab kerusakan jalan, agar di masa mendatang faktor penyebab kerusakan jalan dapat dikurangi.

Selain upaya-upaya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melakukan upaya pencegahan kerusakan jalan sebagai berikut :

1. Mendukung kegiatan operasi penertiban kendaraan berat (koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian);
2. Melengkapi badan jalan dengan saluran tepi;
3. Melaksanakan normalisasi saluran tepi;
4. Menggunakan material aspal buton (lebih tahan terhadap air) pada pekerjaan pemeliharaan swakelola;



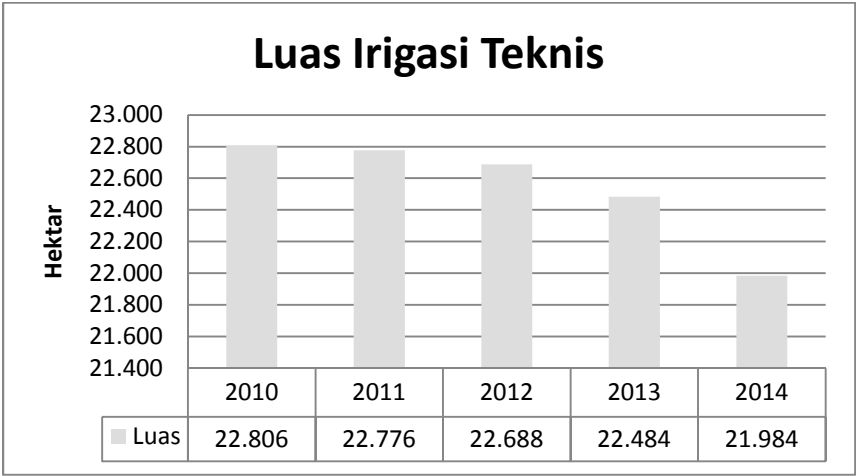
d. Luas areal dengan irigasi teknis

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian diukur sampai sejauh mana daerah irigasi teknis yang dapat dipertahankan keberadaannya. Pada tahun 2014 luas areal yang dapat diairi melalui jaringan irigasi teknis seluas 21.984 Ha, yang terdiri dari:

- Jaringan Irigasi Primer Mangetan Kanal : 11.390 Ha.
- Jaringan Irigasi Primer Porong Kanal : 10.594 Ha.

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 seluas 22.484 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu seluas 500 Hektar. Penurunan luas baku sawah dari tahun ketahun terjadi karena adanya perubahan tata guna lahan (mutasi baku sawah) dari areal persawahan menjadi kawasan perumahan, industri maupun pergudangan.

Grafik III.4.3



Sumber Data : Dinas PU Pengairan

Luasan Daerah Irigasi

No	Tahun	Target RPJMD	Daerah Irigasi	Penurunan
1	2010	22.806	22.806	
2	2011	22.776	22.776	-30
3	2012	22.688	22.688	-88
4	2013	22.575	22.484	-204
5	2014	22.463	21.984	-500



Angka dasar RPJMD tahun 2010 daerah irigasi teknis dinyatakan 22.806 hektar dan target RPJMD tahun 2014 seluas 22.463 hektar, sudah terealisasi penurunannya menjadi 21.984 hektar, artinya penurunan daerah irigasi teknis cukup tajam, oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan dan penataan ulang untuk wilayah industri dan perumahan sehingga penurunan daerah irigasi teknis dapat lebih terkendali.

a. Jumlah sarana air bersih yang dibangun

Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap akses air bersih maka pemerintah kabupaten membangun sarana air bersih untuk daerah yang masih belum dapat terjangkau pelayanan air oleh PDAM.

Pembangunan sarana air bersih ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi keperluan air minum serta keperluan rumah tangga lainnya. Jumlah yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah sarana air bersih yang dibangun ditargetkan sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit, yaitu

1. Pembuatan Sumur Bor Dalam Ds Kramattemenggungan - Kec Tarik
2. Pembuatan Sumur Bor Dalam Ds Telasih - Kec Tulangan

Jika dilihat dari jumlah sarana air bersih yang dibangun di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sama / tidak terdapat peningkatan, ini dikarenakan pada tahun 2014 Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang mendahulukan pengembangan / peningkatan Sarana Air Bersih yang telah dibangun pada tahun sebelumnya dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain penyambungan Sambungan Rumah (SR), Rehabilitasi pompa air bersih, dan pembangunan pipa distribusi air bersih serta intalasi jaringan air bersih, pada beberapa lokasi (tabel A.1.)

Perkembangan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik III.4.4



Sumber data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH TAHUN 2014

NO.	URAIAN
1.	Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungbanteng Kec Tanggulangin
2.	Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarpanji Kec Tanggulangin
3.	Pemb Instalasi AB Ds Kupang Kec Jabon
4.	Pemb Pipa Distribusi Ds Glagaharum Kec. Porong
5.	Pemb Pipa Distribusi Ds Tambakkalisogo Kec. Jabon
6.	Pemb Pipa Distribusi Ds Pangkemiri Kec Tulangan
7.	Rehab Pompa AB Ds Kendalpecabean
8.	Pemb Instalasi AB Ds Putat Tanggulangin
9.	Rehab Pompa AB Ds Penatarsewu Tanggulangin
10.	Rehab Pompa AB Ds Balongdowo Candi
11.	Pemasangan SR Ds Sawohan Buduran
12.	Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungpandan Kec Jabon
13.	Pembangunan Pipa Distribusi Ds Jengot Kec Krembung
14.	Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarasri Kec Tanggulangin
15.	Pemb Instalasi AB Kalidawir Kec. Tanggulangin

Sedangkan untuk pengelolaan Air Bersih dan Jaringannya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan pendampingan dengan membentuk kelompok – kelompok Himpunan Pengelola Air Minum (HIPPAM) pada masing – masing sarana Air Bersih yang telah dibangun, dimana sampai dengan saat ini telah dibentuk 23 kelompok HIPPAM dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak 1550 unit sambungan. Jumlah sarana air bersih sampai dengan tahun 2014 sudah berhasil dibangun sebanyak 27



unit, Sarana air bersih yang telah terbangun pada umumnya telah diserahkan kepada kelompok masyarakat di Pedesaan untuk dikelola, dipelihara dan dimanfaatkan, pengembangan jaringan SR sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 1490 SR dan 1 unit Hidran Umum. Dengan semakin banyaknya sarana air bersih yang telah dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih khususnya pada daerah yang tidak terjangkau pelayanan PDAM, sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi lebih baik.

b. Jalan lingkungan yang telah terbangun

Untuk mengatur lingkungan permukiman yang sehat dan rapi perlu dibangun jalan lingkungan. Pembangunan Jalan lingkungan ini dapat berupa meningkatkan jalan yang sudah ada maupun membangun jalan baru.

Jalan lingkungan khususnya pada daerah yang padat penduduk biasanya kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu pada beberapa wilayah pemerintah kabupaten melakukan penataan jalan lingkungan tersebut sehingga suasana lingkungan dapat lebih rapi dan tertib.

Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2014 sepanjang 85.331 meter, sehingga sampai dengan tahun 2014 telah dibangun sepanjang 288.041 meter (termasuk didalamnya jalan lingkungan program pengembangan kawasan) Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah.

Grafik III.4.5



Sumber data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang



Dengan dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan dapat lebih tertata rapi dan masyarakat dapat lebih nyaman menjalankan aktifitas di lingkungannya.

Dibanding tahun 2013, perkembangan jalan lingkungan yang dibangun oleh Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang di tahun 2014 turun 12.755 meter, penurunan ini karena adanya pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah propinsi dengan program Jasmas Propinsi maupun oleh desa sendiri melalui program PNPM mandiri.

5. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

1. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Ruang terbuka yang bermanfaat dan bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.

Adapun manfaat RTH di wilayah perkotaan antara lain sebagai berikut :

- a) Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota;
- b) Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
- c) Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah;
- d) Sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah;
- e) Sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjamin;
- f) Sirkulasi udara dalam kota;
- g) Sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.



Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengelola Ruang Terbuka Hijau seluas 27,94 hektar, sedangkan target tahun 2014 sebesar 27 hektar, dengan capaian sebesar 103%. Dibandingkan dengan realisasi capaian RTH tahun 2013 seluas 12,78 hektar maka realisasi capaian RTH tahun 2014 meningkat sebesar 39,1%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan fungsi lahan Ex TPA menjadi lahan Taman seperti Lahan Ex TPA di desa Bluru Kecamatan Sidoarjo, Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon serta alih fungsi lahan Ex Kantor Kawedanan Porong menjadi Taman Dwarakerta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau melalui beberapa hal, antara lain :

- Mendata luasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH seperti lahan tidur, lahan sempadan sungai, lahan dibawah tegangan tinggi, dll
- Menambah sarana prasarana pengelolaan RTH
- Sosialisasi / penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan menjadi RTH
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan RTH
- Meningkatkan fungsi RTH menjadi taman wisata, taman pendidikan, dll

6. Urusan Perumahan

Urusan perumahan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Jumlah sarana air bersih yang dibangun

Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap akses air bersih maka pemerintah kabupaten membangun sarana air bersih untuk daerah yang masih belum dapat terjangkau pelayanan air oleh PDAM.

Pembangunan sarana air bersih ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi keperluan air minum serta keperluan rumah tangga lainnya. Jumlah yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



Pada tahun 2014 jumlah sarana air bersih yang dibangun ditargetkan sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit, yaitu

- 1. Pembuatan Sumur Bor Dalam Ds Kramattemenggungan - Kec Tarik
- 2. Pembuatan Sumur Bor Dalam Ds Telasih - Kec Tulangan

Jika dilihat dari jumlah sarana air bersih yang dibangun di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sama / tidak terdapat peningkatan, ini di karenakan pada tahun 2014 Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang mendahulukan pengembangan / peningkatan Sarana Air Bersih yang telah di bangun pada tahun sebelumnya dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain penyambungan Sambungan Rumah (SR), Rehabilitasi pompa air bersih, dan pembangunan pipa distribusi air bersih serta intalasi jaringan air bersih, pada beberapa lokasi (tabel A.1.)

Perkembangan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.6.1



Sumber data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH TAHUN 2014

NO.	URAIAN
1.	Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungbanteng Kec Tanggulangin
2.	Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarpanji Kec Tanggulangin
3.	Pemb Instalasi AB Ds Kupang Kec Jabon
4.	Pemb Pipa Distribusi Ds Glagaharum Kec. Porong
5.	Pemb Pipa Distribusi Ds Tambakkalisogo Kec. Jabon
6.	Pemb Pipa Distribusi Ds Pangkemiri Kec Tulangan
7.	Rehab Pompa AB Ds Kendalpecabean
8.	Pemb Instalasi AB Ds Putat Tanggulangin
9.	Rehab Pompa AB Ds Penatarsewu Tanggulangin



10.	Rehab Pompa AB Ds Balongdowo Candi
11.	Pemasangan SR Ds Sawohan Buduran
12.	Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungpandan Kec Jabon
13.	Pembangunan Pipa Distribusi Ds Jengot Kec Krembung
14.	Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarasri Kec Tanggulangin
15.	Pemb Instalasi AB Kalidawir Kec. Tanggulangin

Sedangkan untuk pengelolaan Air Bersih dan Jaringannya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan pendampingan dengan membentuk kelompok – kelompok Himpunan Pengelola Air Minum (HIPPAM) pada masing – masing sarana Air Bersih yang telah dibangun, dimana sampai dengan saat ini telah dibentuk 23 kelompok HIPPAM dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak 1550 unit sambungan. Jumlah sarana air bersih sampai dengan tahun 2014 sudah berhasil dibangun sebanyak 27 unit, Sarana air bersih yang telah terbangun pada umumnya telah diserahkan kepada kelompok masyarakat di Pedesaan untuk dikelola, dipelihara dan dimanfaatkan, pengembangan jaringan SR sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 1490 SR dan 1 unit Hidran Umum. Dengan semakin banyaknya sarana air bersih yang telah dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih khususnya pada daerah yang tidak terjangkau pelayanan PDAM, sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi lebih baik.

4. Jalan lingkungan yang telah terbangun

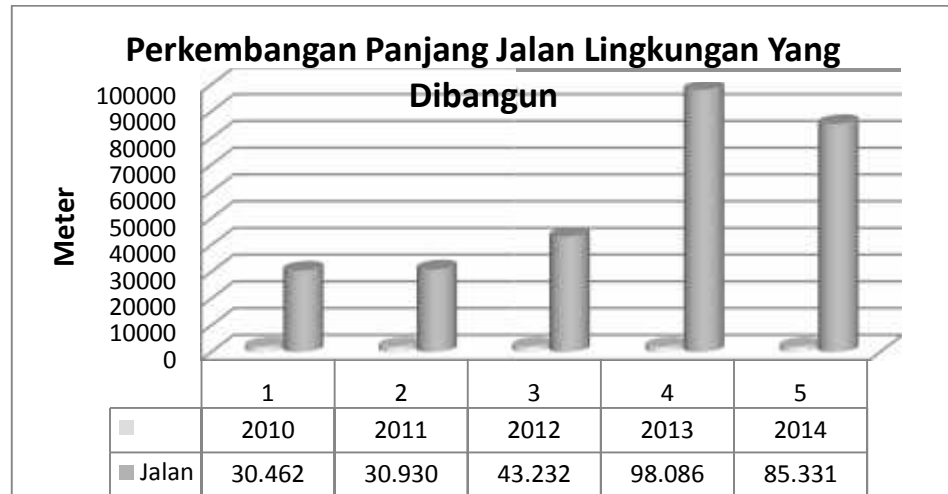
Untuk mengatur lingkungan permukiman yang sehat dan rapi perlu dibangun jalan lingkungan. Pembangunan Jalan lingkungan ini dapat berupa meningkatkan jalan yang sudah ada maupun membangun jalan baru.

Jalan lingkungan khususnya pada daerah yang padat penduduk biasanya kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu pada beberapa wilayah pemerintah kabupaten melakukan penataan jalan lingkungan tersebut sehingga suasana lingkungan dapat lebih rapi dan tertib.

Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2014 sepanjang 85.331 meter, sehingga sampai dengan tahun 2014 telah dibangun sepanjang 288.041 meter (termasuk didalamnya jalan lingkungan program

pengembangan kawasan) Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah.

Grafik III.6.2



Sumber data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

Dengan dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan dapat lebih tertata rapi dan masyarakat dapat lebih nyaman menjalankan aktifitas di lingkungannya.

Dibanding tahun 2013, perkembangan jalan lingkungan yang dibangun oleh Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang di tahun 2014 turun 12.755 meter, penurunan ini karena adanya pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah propinsi dengan program Jasmas Propinsi maupun oleh desa sendiri melalui program PNPM mandiri.

1) Jumlah Rehabilitasi / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan pada tahun 2014 sebanyak 175 unit rumah (program reguler 100 unit dan PTBK 75 unit) atau terealisasi 100%, dari target yang direncanakan sebanyak 175 unit rumah sesuai data PPLS. Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014



sebanyak 985 rumah, 1.000 unit rumah yang direhabilitasi oleh KODIM Sidoarjo pada tahun 2010 dengan menggunakan dana APBD Provinsi dan melalui program CSR sebanyak 100 rumah, sehingga total rumah yang sudah direhabilitasi sebanyak 1.985 atau 99,79% dari jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebanyak 1.989 rumah.

Jika dibandingkan dengan jumlah rumah keluarga miskin yang sudah mendapatkan bantuan rehabilitasi/perbaikan tahun 2013 sebanyak 1.810 rumah, maka dalam tahun 2014 terdapat peningkatan sebanyak 175 rumah.

Perkembangan perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang didukung dari dana pemerintah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik III.6.3



Sumber data : BPMPKB

7. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator kinerja perencanaan pembangunan yaitu tersedianya dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, PRJMD, RKPD, serta penjabarannya. Urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah :



a. Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen penelitian yang dihasilkan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 46 dokumen. Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan tercatat sebanyak 1 (satu) dokumen belum ditindaklanjuti. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kajian tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun 2015. Dengan demikian dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditindaklanjuti mencapai 97,83%.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah sebanyak 61 dokumen. Mengingat dokumen tersebut baru selesai pada akhir tahun 2014 dan monitoring serta evaluasi terhadap dokumen tersebut belum teranggarkan pada tahun 2015, maka monitoring dan evaluasi untuk dokumen perencanaan pembangunan tahun 2014 akan dilaksanakan tahun 2016.

b. Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penelitian

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu diukur tingkat pemanfaatannya oleh SKPD terkait. Realisasi dokumen perencanaan dan dokumen penelitian yang dihasilkan di tahun 2014 sebanyak 61 dokumen yang akan dimanfaatkan baik untuk keperluanjangkapendek (tahunan) maupun jangka menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun) oleh instansi terkait.

Dari aspek pemanfaatan dokumen dapat dipisahkan :

- a. Dokumen yang terkait dengan data maupun indikator kinerja pembangunan sepenuhnya telah dimanfaatkan baik untuk acuan perencanaan maupun untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
- b. Untuk dokumen perencanaan pembangunan juga dimanfaatkan sebagai acuan pembangunan bagi seluruh SKPD maupun acuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- c. Sedangkan dokumen hasil penelitian maupun kajian, sudah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat dimanfaatkan.



8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sarana olahraga milik pemerintah yang meningkat kualitasnya

Untuk memasyarakatkan olahraga di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah sarana olahraga milik pemerintah tahun 2014 masih berjumlah 3 kawasan yaitu Kawasan Gelora Delta, Stadion Jenggolo dan Gedung Bulutangkis Sulaksana, sedangkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Sidoarjo seluruhnya sebanyak 379 unit termasuk didalamnya milik swasta, yang terdiri dari stadion/lapangan sepak bola, bola voli, bola basket, bulutangkis, renang, tenis lapangan, tenis meja, senam/fitness, futsal, atletik, pencak silat dan billyard. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana olahraga sesuai status kepemilikannya Tahun 2014:

NO	JENIS LAPANGAN OLAHRAGA	JUMLAH			TOTAL
		KABUPATEN	DESA	SWASTA	
1	Sepak Bola	2	103	8	113
2	Bola Voli	2	56	23	81
3	Bola Basket	1	3	3	7
4	Bulutangkis	1	36	50	87
5	Renang	1	0	20	21
6	Tenis Lapangan	1	0	4	5
7	Tenis Meja	0	14	7	21
8	Senam/Fitness	0	3	7	10
9	Futsal	0	6	13	19
10	Atletik	1	1	0	2
11	Pencak Silat	0	1	0	1
12	Billyard	0	0	13	13
13	Panjat Tebing	2	0	2	4
14	Sepak Takraw	1	0	1	2
TOTAL		12	223	151	386



Sedangkan rincian sarana dan prasarana olahraga sesuai status kepemilikannya Tahun 2013:

NO	JENIS LAPANGAN OLAHRAGA	JUMLAH			TOTAL
		KABUPATEN	DESA	SWASTA	
1	Sepak Bola	2	54	0	56
2	Bola Voli	2	27	10	39
3	Bola Basket	29	0	5	34
4	Bulutangkis	1	3	38	42
5	Renang	1	0	14	15
6	Tenis Lapangan	1	0	17	18
7	Tenis Meja	0	1	2	3
8	Senam/Fitness	0	0	0	0
9	Futsal	1	0	24	25
10	Atletik	0	0	0	0
11	Pencak Silat	0	0	0	0
12	Billyard	0	0	0	0
13	Panjat Tebing	2	0	2	4
14	Lap. Sepak Takraw	1	0	1	2
TOTAL		40	85	113	238

Jika dibanding tahun 2013 terdapat peningkatan sebanyak 141 unit atau 59,24% sarana dan prasarana olahraga yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah perbandingan jumlah sarana dan prasarana olahraga antara tahun 2013 dan 2014 :

Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang meningkat kualitasnya	3 Kawasan	3 Kawasan, 238 Unit	3 Kawasan	3 Kawasan, 379 Unit

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut dipelihara sesuai kemampuan keuangan daerah agar tetap dapat berfungsi optimal.



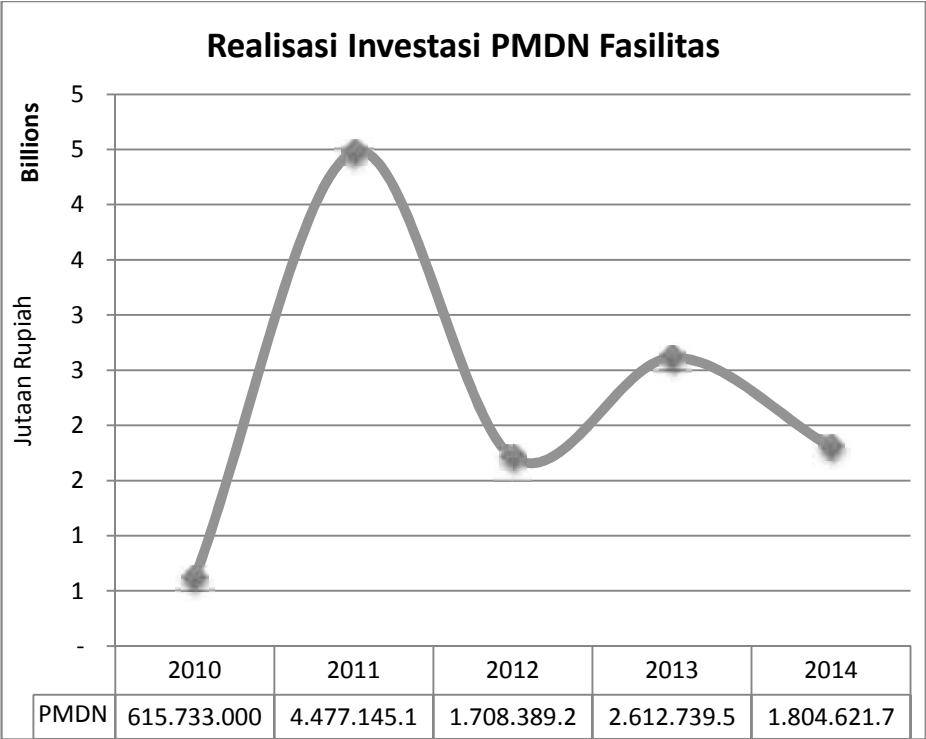
9. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, indikator kinerja yang dilaksanakan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Investasi PMDN Fasilitas di Daerah

Berikut ini adalah grafik jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo.

Grafik III.9.1



Sumber data : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Realisasi jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp. 1.804.621.728.411,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 2.612.739.591.000,00 terjadi penurunan mencapai 30,93%.

Meskipun demikian capaian investasi PMDN Fasilitas di tahun 2014 sudah jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 640.734.195.710,00 atau sekitar 281,65%.

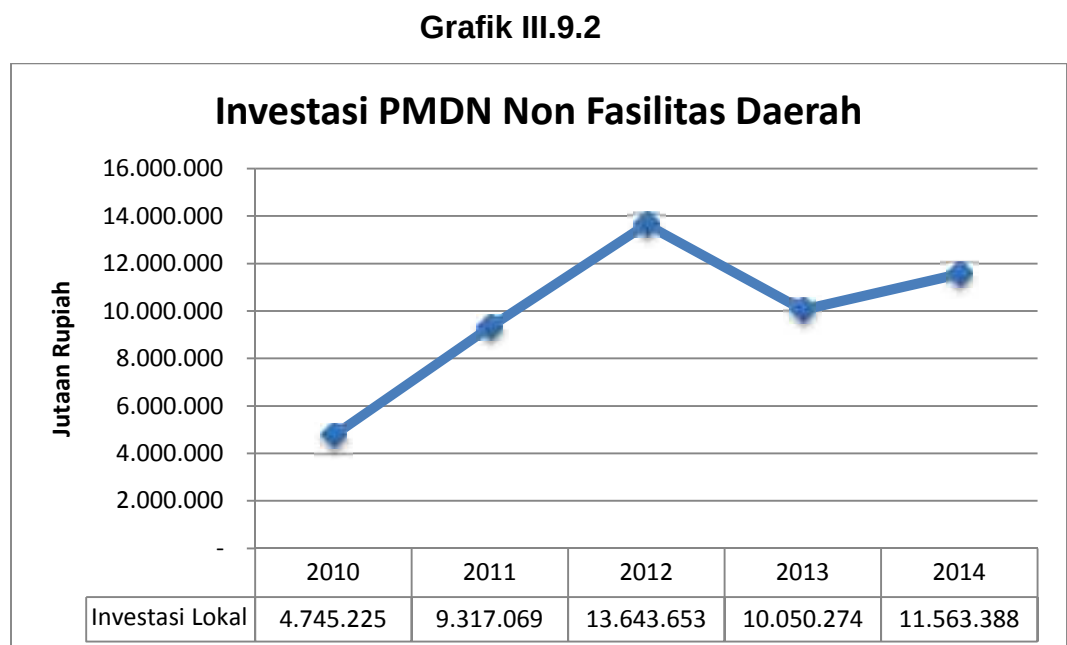


Penurunan ini disebabkan :

- 1.Sikap wait and see investor karena adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
- 2.Pada tahun 2013 banyak terjadi proyek perluasan perusahaan
- 3.Nilai kurs dollar meningkat sehingga mempengaruhi kegiatan impor (mesin, bahan baku)

b. Jumlah Investasi PMDN Non Fasilitas di Daerah

Berikut ini adalah grafik perkembangan realisasi jumlah investasi PMDN Non Fasilitas dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber data : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Realisasi jumlah investasi PMDN Non Fasilitas tahun 2014 sebesar Rp. 11.563.388.898.345,00 apabila dibandingkan dengan investasi PMDN Non Fasilitas tahun 2013 sebesar Rp. 10.050.274.260.322,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.513.114.638.023,00 atau 15,06%, nilai investasi tersebut diatas target kinerja tahun 2014 sebesar 225,13%.

Untuk tetap mempertahankan Investasi lokal pada nilai investasi optimal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan tetap melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1395/404.3.2/2014 Tanggal 15 Desember Tahun 2014 tentang



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo, dan mendasari Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/2810/202.6/2013 Tanggal 25 Maret 2013 perihal tindak lanjut penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 5 Tahun 2012 Tanggal 21 Juni 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tahun 2011-2031
3. Kemudahan persyaratan perizinan
4. Adanya kegiatan penyisiran wajib izin

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN, antara lain :

1. Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) penanaman modal yang mengatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal
2. Adanya kepastian peruntukan investasi sesuai dengan bidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa
3. Promosi investasi yang berkelanjutan
4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memadai (Gas, Jalan, Listrik, dsb)

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

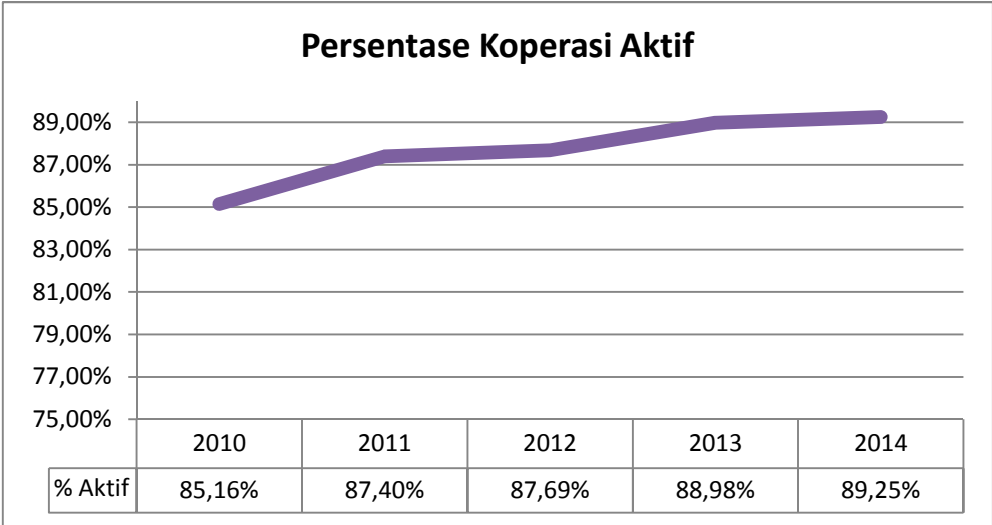
a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2014 sebesar 89,25%, dimana sebanyak 1.179 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari sekitar 1.321 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan persentase koperasi aktif tahun 2013 sebesar 88,98% terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,27%.

Perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :



Grafik III.10.1



Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2013 sebanyak 1.171 unit menjadi 1.179 unit di tahun 2014 atau terjadi peningkatan 8 unit koperasi. Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif selama lima tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.10.2



Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Jumlah koperasi aktif meningkat, hal ini disebabkan karena adanya pendirian koperasi baru di Kecamatan Sidoarjo (3 koperasi), Kecamatan Porong (1 koperasi) dan Kecamatan Prambon (1 koperasi). Sedangkan koperasi yang sudah tidak aktif dan akan diaktifkan kembali sebanyak 3

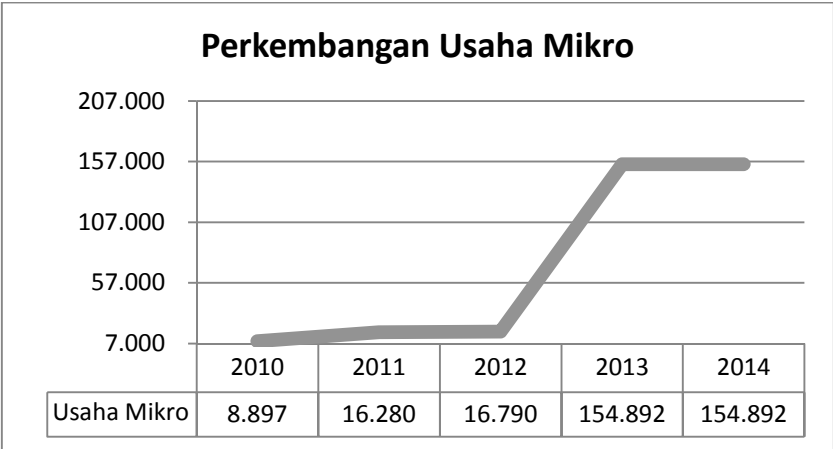


koperasi yaitu Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sidoarjo.

b. Jumlah usaha mikro

Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.10.3



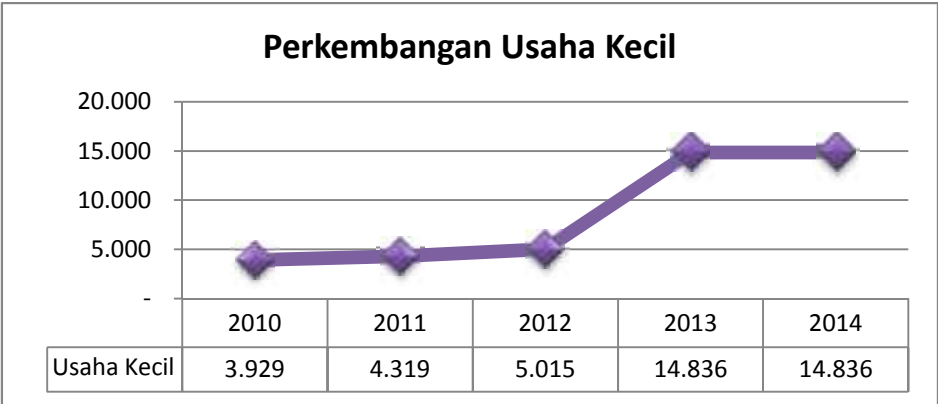
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo

Realisasi tahun 2014 sebanyak 154.892 unit sama dengan realisasi tahun 2013, hal ini disebabkan karena pihak BPS masih melakukan pendataan ulang.

c. Jumlah usaha kecil

Perkembangan jumlah usaha kecil selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.10.4



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo

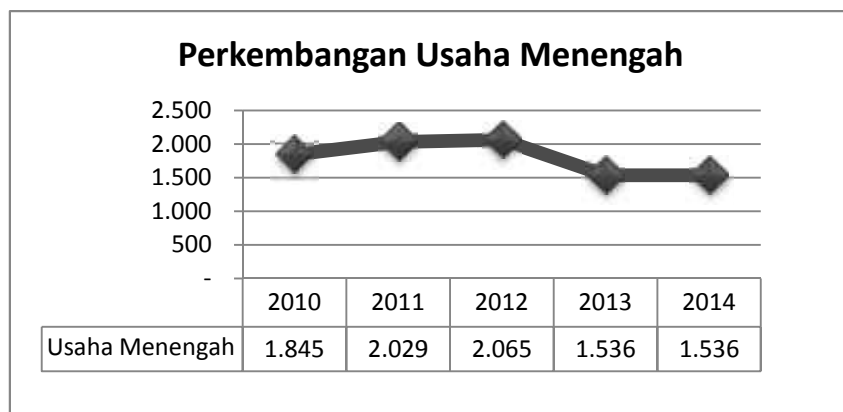


Jumlah usaha kecil pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 atau tidak terjadi perubahan, yaitu sebanyak 14.836 unit. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 4.005 unit tercapai sebesar 371,11%. Hal ini disebabkan antara lain pembinaan, pelatihan, bantuan peralatan ketrampilan dan pemberian pinjaman modal lunak dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

d. Jumlah usaha menengah

Perkembangan jumlah usaha menengah selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik III.10.5



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo

Realisasi jumlah usaha menengah tahun 2014 juga masih sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 1.536 unit. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 2.053 unit tercapai sebesar 74,82%. Hal ini disebabkan sebagian unit usaha menengah memecah diri menjadi usaha-usaha mikro yang mandiri.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :



1. Persentase penduduk ber KTP

Untuk mengukur pelayanan kependudukan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat, perlu dilihat berapa jumlah penduduk yang ber-KTP. Pemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Realisasi jumlah penduduk yang ber-KTP ditahun 2014 sebanyak 1.212.670 jiwa atau 66,90% dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sebanyak 1.583.324 jiwa

Grafik III.11.1



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-EL sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.212.670 jiwa dari yang wajib ber KTP 1.583.324 jiwa atau sekitar 76,59%. Jumlah yang sudah terekam meliputi :

- 1. Penduduk yang masih ber KTP manual;
- 2. Penduduk wajib KTP Pemula.
- 3. Penduduk pindah datang ke Kabupaten Sidoarjo.

Capaian ini sudah memenuhi target RPJMD dan Penetapan Kinerja yang hanya 65 %.

Adapun kendala dalam perekaman KTP Elektronik, antara lain :

1. Ketersediaan perangkat perekaman KTP elektronik yang terbatas dalam kondisi tidak optimal difungsikan.
2. Dalam tahun 2014 Cetak KTP elektronik masih dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Adminduk sehingga hasil pencetakan perekaman KTP-Elektronik belum maksimal .
3. Adanya penduduk yang bekerja di luar daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak bisa datang perekaman data KTP-Elektronik tepat waktu

Dalam tahun 2015 pencetakan KTP-Elektronik sepenuhnya diserahkan kepada masing – masing Kabupaten/Kota, namun demikian Ketersediaan Blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri yang dikirim ke Kabupaten tidak sesuai kuota wajib KTP elektronik sehingga terjadi keterlambatan dalam pencetakan KTP-Elektronik.

Grafik III.11.2



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Persentase penduduk ber Akta kelahiran

Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta kelahiran. Akta ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk yang lahir di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2014 penduduk yang mengurus Akta kelahiran sesuai Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Sidoarjo sebanyak 29.440 orang, apabila dibandingkan dengan pengurusan tahun 2013 sebanyak 29.902 orang terjadi penurunan sebanyak 462 orang (1,55%).

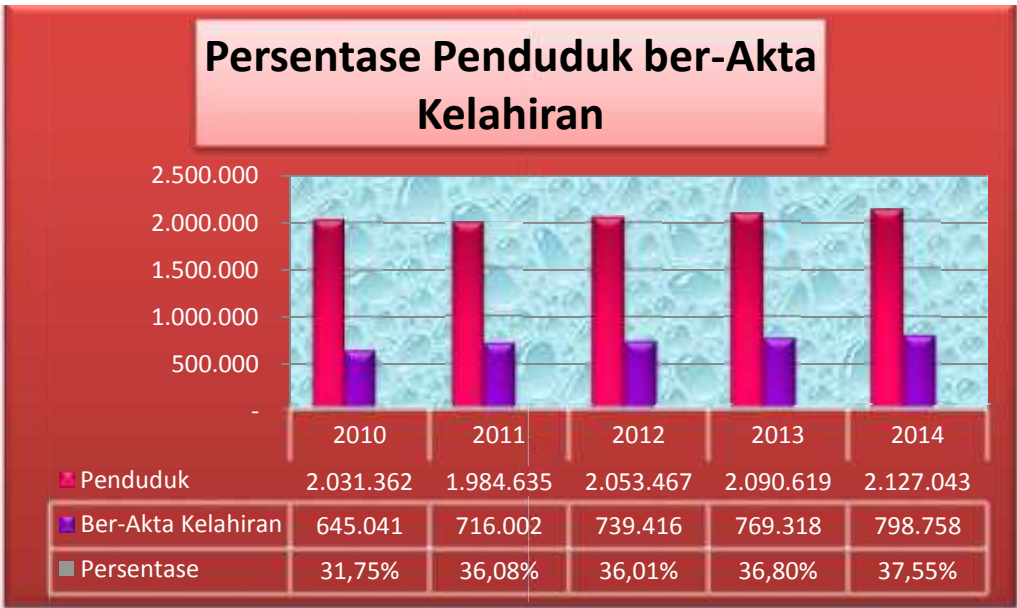
Adapun jumlah kepemilikan akta kelahiran tersebut sampai dengan tahun 2014 sebanyak 798.758 orang atau 37,55% dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang sebesar 769.318 orang atau 36,80% ada peningkatan sebesar 0,75% walaupun peningkatannya kecil namun Capaian tahun 2014 sudah melampaui target yang hanya 35%.

Peningkatan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran secara keseluruhan ini dikarenakan adanya upaya

Antara lain :

1. Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran meningkat.
2. Adanya peningkatan frekuensi pelaksanaan pendekatan pelayanan untuk masyarakat (program Jemput Bola) dalam pengurusan akta kelahiran..
3. Adanya dukungan regulasi yang jelas telah memotifasi masyarakat untuk memahami pentingnya dokumen pencatatan sipil.
4. Adanya kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Grafik III.11.3



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



12. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.12.1



Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan meningkat dibanding tahun 2013. Hal ini menunjukkan kemampuan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan secara mandiri atau menciptakan lapangan kerja secara mandiri (berwirausaha), namun demikian apabila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yang sedikit naik berarti pada tahun 2014 juga terjadi PHK/pengurangan pekerja pada beberapa perusahaan.

Dengan berkembangnya dan meningkatnya program-program kegiatan pelatihan dan produktifitas telah berdampak terhadap kemampuan kemandirian pencari kerja yang mengakses program tersebut sehingga pencari kerja mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri minimal untuk dirinya sendiri maupun untuk pencari kerja yang lain.



Banyaknya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dipengaruhi oleh :

- Kerjasama lembaga penempatan tenaga kerja swasta, pelaksanaan bursa kerja khususnya bursa kerja swasta.
- Pengenalan Dunia kerja dan persyaratan kerja pada Informasi Pasar Kerja, melalui Bursa Kerja Terbuka (BKT) dan Bursa Kerja Online (BKOL).
- Sosialisasi dan sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama perusahaan dan dunia pendidikan, lembaga pelayanan penempatan swasta, serta *stakeholder* lain yang peduli terhadap adanya pengangguran.

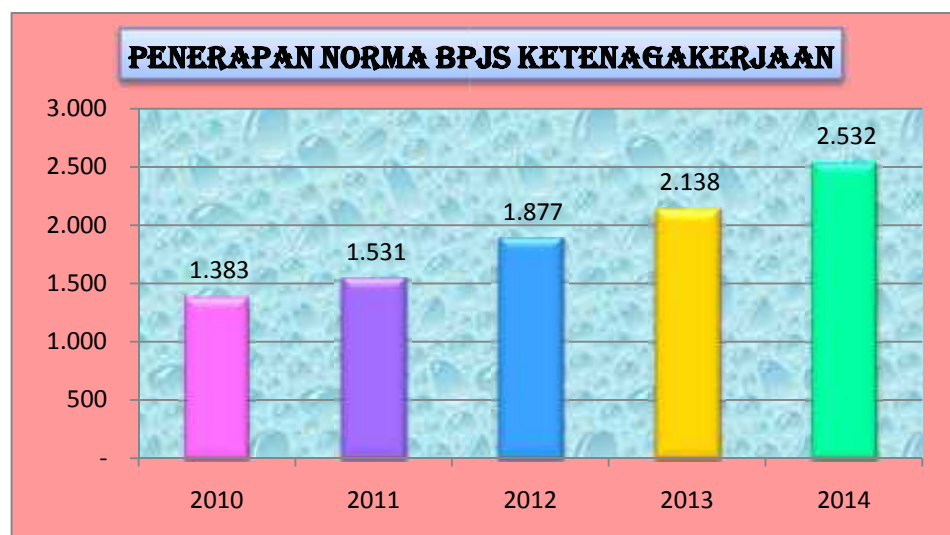
b. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS

Bahwa sistem jaminan nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Di tahun 2014 Jamsostek telah berubah nama menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pembinaan dan pengawasan mekanisme norma BPJS di perusahaan merupakan komitmen tegas dan lugas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi hak-hak pekerja / buruh.

Berikut ini adalah grafik perkembangan jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS.

Grafik III.12.2



Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Adapun jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2014, terdapat peningkatan 394 perusahaan yang menerapkan norma BPJS dibandingkan dengan tahun 2013, dan sudah melampaui target RPJM tahun 2014 sebesar 1.463 perusahaan dan target Tapkin 2014 sebesar 1.443 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS merupakan suatu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi bersama-sama *stakeholder* dalam pembinaan dan pengawasan norma BPJS pada perusahaan.

Tahun / Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Penerapan BPJS	1.383	1.531	1.877	2.138	2.532
Jmlh Persh yang ada terdaftar	2.049	2.188	2.406	2.560	2.635
Prosentase	67,50%	69,97%	78,01%	83,52%	96,09%

* Jumlah Perusahaan yang ada terdaftar berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (UU No. 7 Tahun 1981)

13. Urusan Ketahanan Pangan

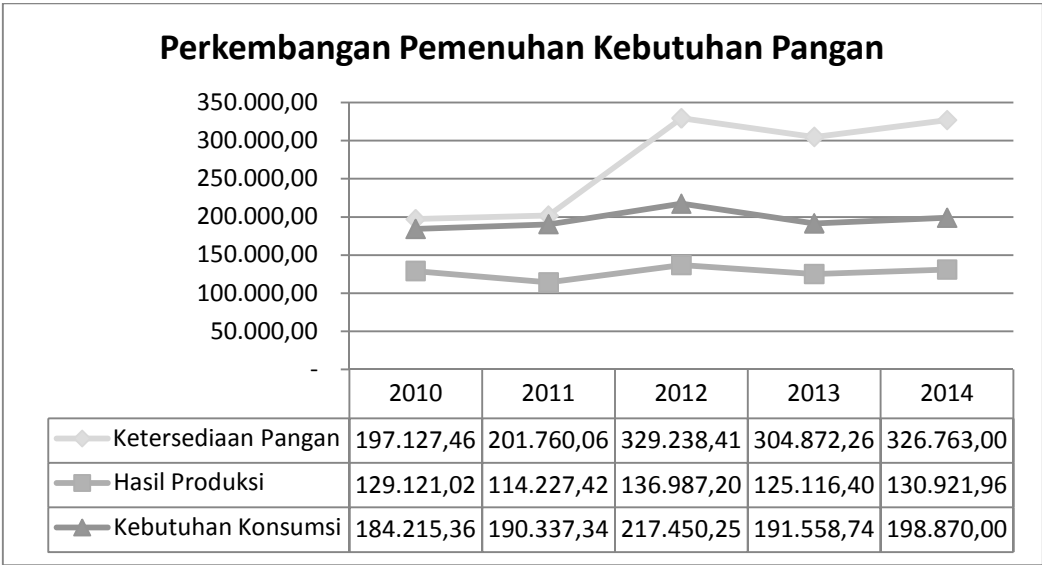
Urusan Ketahanan Pangan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan Pangan Daerah

Hasil produksi kabupaten Sidoarjo untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih kurang, sehingga perlu dipasok dari daerah lain. Untuk memenuhi ketersediaan pangan khususnya beras. Perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan khususnya beras tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik III.13.1



Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan

Untuk menunjang Ketersediaan Pangan berupa energy 2400 kkd/kap/hr dan protein 63 gr/kop/hr diperlukan berbagai upaya sebagaimana berikut:

- Optimalisasi pekarangan melalui pengembangan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat meningkat ketersediaan pangan (protein dan mineral) ditingkat rumah tangga sehingga kecukupan pangan dapat terpenuhi. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan KRPL di 16 Kelompok/Desa;
- Peningkatan cadangan pangan melalui kegiatan Lembaga Pembelian Gabah Petani (LPG) diharapkan dapat menjadi mitra kerja kelompok tani / gapoktan mampu untuk menyediakan pangan khususnya beras dan menstabilkan harga gabah ditingkat petani, untuk tahun 2014 terdapat 35 LPG yang mendapatkan dana bergulir untuk pembelian gabah petani.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

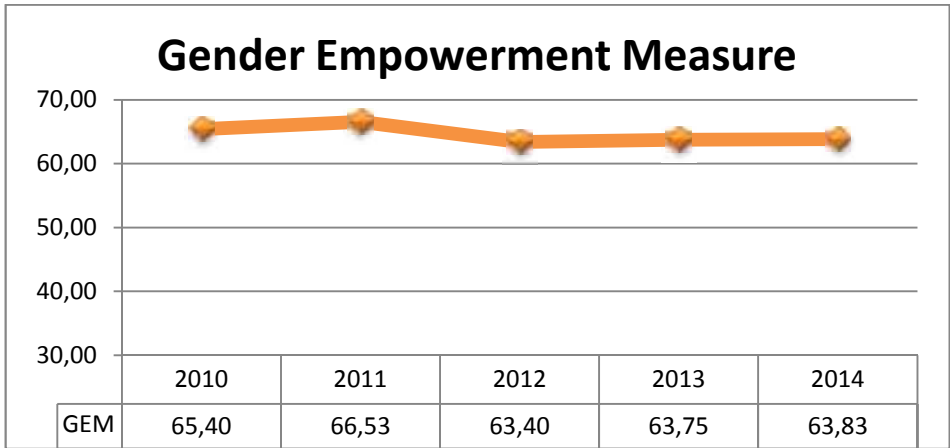


1. Gender Empowerment Measurement (GEM)

Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Perkembangan IDJ selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik III.14.1



Sumber data : BPMPKB dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Adapun variabel penyusun IDJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 49,77% sedangkan perempuan sebesar 50,22%;
- Keterwakilan di parlemen, laki-laki 84% sedangkan perempuan 16%;
- Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki 55,32% sedangkan perempuan 44,68%;
- Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi), laki-laki 71,85% sedangkan perempuan 28,15%;

Dari tabel diatas capaian GEM atau IDJ tahun 2014 sebesar 63,83% belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perbaikan Renstra sebesar 67,45% Hal tersebut disebabkan :



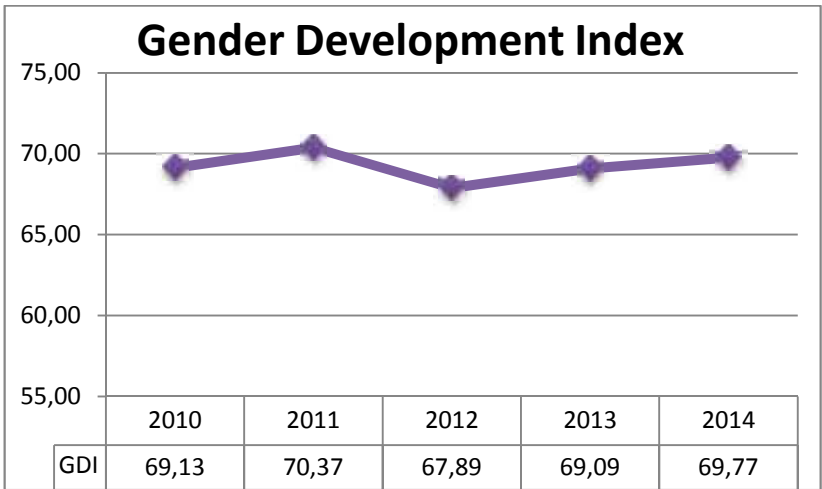
- a) Karena jumlah pejabat perempuan hanya 37,76% atau 333 orang perempuan dan 62,24% atau 549 orang laki-laki dari 882 orang pejabat yang ada.
- b) Jumlah keanggotaan DPRD perempuan belum mencapai target 30% dan Kabupaten Sidoarjo hanya 14% atau 7 orang anggota DPRD perempuan sedangkan laki – laki 86% atau 43 orang dari jumlah 50 orang keseluruhan anggota DPRD.

2. Gender Development Index (GDI)

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPJ) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas jender.

Perkembangan IPJ selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik III.14.2



Sumber data : BPMPKB dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Variabel penyusun IPJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 49,77% sedangkan perempuan sebesar 50,22%;
- 2) Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk kabupaten Sidoarjo, yaitu penduduk laki-laki dari 69,36 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 73,38 tahun;
- 3) Angka Melek Huruf (AMH) yaitu untuk penduduk laki-laki 99,88% sedangkan untuk penduduk perempuan 98,26%;



- 4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,80 tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,94 tahun;
- 5) Proporsi Sumbangan Pendapatan (PSP), laki-laki 71,85% sedangkan perempuan 28,15%;

Dari tabel diatas capaian GDI atau IPJ tahun 2014 sebesar 69,77% telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perubahan Renstra sebesar 69,30%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua program Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah responsip jender.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif

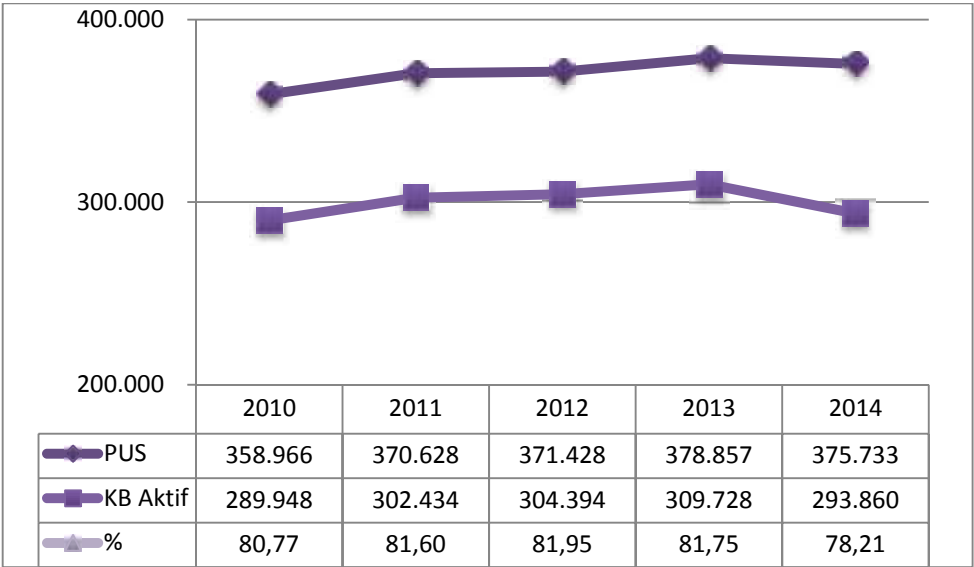
Tingkat prevalensi Peserta KB Aktif adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.

Dalam tahun 2014, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 78,21%, yaitu perbandingan antara jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 293.860 akseptor dengan jumlah seluruh PUS yaitu sebanyak 375.733 pasangan. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 81,77% maka capaian kinerja sebesar 95,65%, begitu juga jika dibandingkan dengan target indikator kinerja dalam Tapkin sebesar 81,52% maka capaian kinerjanya 95,94%. Namun jika dibandingkan dengan tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2013 yaitu sebesar 81,75%, maka tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2014 secara prosentase mengalami penurunan sebesar 3,54%.

Perkembangan Peserta KB Aktif selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut :



Grafik III.15.1



Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Jumlah peserta KB aktif dari tahun ketahun terus meningkat, namun persentasenya terhadap PUS untuk tahun 2014 mengalami penurunan di banding tahun 2013. Hal ini disebabkan terdapat peserta KB aktif yang *drop out* atau Pasilitas Kesehatan KB perbatasan, sehingga pembinaan kepada peserta KB aktif masih perlu ditingkatkan melalui peran serta kader institusi masyarakat pedesan (IMP) sebagai pengelola program KB tingkat Desa/Kelurahan, Dusun, RW,RT.

16. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal

Untuk mengukur kehandalan sistem transportasi massal yang mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan perekonomian daerah maka salah satu ukurannya adalah jumlah penumpang umum yang terangkut oleh kendaraan umum.



Jumlah penumpang yang terangkut/terlayani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

Jumlah Penumpang yang terangkut (orang)			
Tahun	Target RPJMD	Realisasi	Prosentase
Tahun 2010	60.821.000	60,821,000	100.00%
Tahun 2011	54.738,000	60,050,000	109.70%
Tahun 2012	49,624,000	60,034,105	120.98%
Tahun 2013	48,772,000	41,046,200	84.16%
Tahun 2014	43.895.000	39.505.500	90,00%

Jumlah penumpang yang terangkut di Terminal wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 menurun yaitu menjadi sebanyak 39.505.500 orang dibanding tahun 2013 sebanyak 41.046,200 orang berarti terjadi penurunan walaupun kecil sebesar 3,89 % dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%.

Sebagai data pendukung atas terjadinya penurunan jumlah penumpang yang terangkut diatas, salah satunya adalah diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah armada angkutan umum perdesaan . Dimana pada tahun 2013 jumlah angkutan umum perdesaan yang beroperasi sebanyak : 686 unit , sementara pada tahun 2014 jumlah angkutan umum perdesaan turun menjadi 565 unit .

Penurunan ini diakibatkan :

- 1) Masyarakat pengguna angkutan umum banyak yang beralih ke kendaraan roda 2 (sepeda motor) .
- 2) Kondisi angkutan umum kurang nyaman dan armada yang kurang
- 3) Tidak adanya Kepastian waktu tempuh perjalanan
- 4) Angkutan massal yang kurang memadai

Upayanya :

1. Penyediaan sarana terminal yang memadai
2. Penyediaan angkutan massal yang memadai ,aman , nyaman dan tepat waktu
3. Pembinaan awak angkutan umum secara berkala

Grafik III.16.1

Jumlah Penumpang Terangkut Tahun 2010 s/d Tahun 2014

*Sumber Data : Dinas Perhubungan*

Kondisi eforia pemakaian roda dua untuk masyarakat menengah kebawah terjadi diseluruh kota di Indonesia, tentu perlu dicarikan solusi yang tepat agar masyarakat berminat kembali untuk menggunakan kendaraan umum; dengan menyediakan kendaraan angkutan umum yang layak, aman, nyaman dan efisien melalui penyediaan angkutan umum massal, dan diharapkan beban jalan menjadi lebih ringan serta tingkat fatalitas di jalan juga dapat ditekan.

17. Urusan Komunikasi dan Informasi

Urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan SKPD yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol, Bagian Telekomunikasi dan Informatika) dan Dinas Perhubungan, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah media informasi

Jumlah media informasi yang dimiliki Kabupaten pada tahun 2014 berupa situs sebanyak 1 (satu) domain yaitu <http://www.sidoarjokab.go.id/> dan 47 sub domain yaitu meliputi 18 Kecamatan, 3 Bagian Setda, 28 Unit Kerja, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Layanan Pengadaan



Secara Elektronik (LPSE), Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M), Media Center Kabupaten Sidoarjo dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi produk Hukum (SJDIH).

Media informasi selain situs yang dimiliki saat ini yaitu berupa :

- 1) 3 (tiga) papan pengumuman;
- 2) 1 (satu) pos pengaduan;
- 3) 3 (tiga) Leaflet / selayang pandang;
- 4) 1 (satu) media cetak yaitu majalah Gema Delta;
- 5) 1 (satu) media center yaitu media center kabupaten Sidoarjo;

Selain itu juga terdapat Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan.

Realisasi capaian tahun 2014 sebanyak 218 pengaduan yang masuk dari masyarakat dan yang ditindaklanjuti sebanyak 199 pengaduan atau 91,28%.

2. **Peningkatan kegiatan promosi produk industri dan kerajinan melalui kegiatan pameran**

Pada tahun 2014 jumlah kegiatan promosi produk industri dan kerajinan yang diimplementasikan melalui kepesertaan pada 10 pameran dan 4 misi dagang, antara lain :

NO	Nama Event / Pameran / Misi Dagang
1	Pameran Pekan Inovasi Sumatera Barat Trade
2	Pameran Internasional Furniture Interior Expo JCC Jakarta
3	Pameran Indo Automotive di Kemayoran Jakarta
4	Pameran Indocraft and Fashion 2014 JCC Jakarta
5	Pesona Kalbar Fair 2014 Pontianak
6	Pameran Paliteral Expo 2014 Atrium Mataram Mall
7	Pameran Negeri Sejuta Pelangi Fair 2014 di Belitung
8	Pameran Indonesia Furniture di JCC Jakarta
9	Pameran di Batam Gelar Produk Daerah
10	Pesta Rakyat Sidoarjo Fair 2014
11	Kunjungan Kerja / Misi Dagang di Batam
12	Kunjungan Kerja / Misi Dagang di Bali
13	Kunjungan Kerja / Misi Dagang di Mataram
14	Kunjungan Kerja / Misi Dagang di Karimun



18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah kegiatan pembinaan politik kepada Masyarakat

Pada tahun 2014 kegiatan pembinaan politik dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 870 orang. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Gathering Wartawan, dengan jumlah peserta 70 orang
2. Kegiatan Panggung Terbuka, dengan jumlah peserta 600 orang
3. Kegiatan Bimtek PNS (Netralitas), dengan jumlah peserta 200 orang

Sedangkan kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas dilaksanakan sebanyak 2 kali, antara lain :

1. Kegiatan Bimtek Ormas, dengan jumlah peserta 70 orang
2. Kegiatan Bimtek LSM, dengan jumlah peserta 54 orang

b. Jumlah kegiatan sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan

Kegiatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan peran serta masyarakat dalam rangka mempererat dan mempersatukan NKRI dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu :

- 1) Taruna Cinta Tanah Air, dengan jumlah peserta 50 orang, 1 kali kegiatan terdiri dari pelajar SMA/SMK Se Kabupaten Sidoarjo
- 2) Forum Komunikasi Umat Beragama, dengan jumlah peserta 50 orang, 1 kegiatan terdiri dari tokoh agama se Kabupaten Sidoarjo (masing-masing 2 orang)
- 3) Forum Pembauran Kebangsaan, dengan jumlah peserta 100 orang, 2 kali kegiatan terdiri dari tokoh lintas etnis (14 etnis) se Kabupaten Sidoarjo
- 4) Generasi Muda, dengan jumlah peserta 50 orang, 1 kali kegiatan terdiri dari pelajar SMA/SMK se Kabupaten Sidoarjo (25 SMA/SMK masing-masing 2 orang)



- 5) Wawasan Kebangsaan Anggota Korsik, dengan jumlah peserta 50 orang, 1 kali kegiatan terdiri dari anggota korsik

c. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pengendalian, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan dalam pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dengan jumlah peserta 18 orang, 1 kali kegiatan terdiri dari tokoh masyarakat, akademik dan pengusaha.

19. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan) terkait Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terkait Penyelesaian ijin lokasi, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Penerbitan Ijin Lokasi

Pada tahun 2014 melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu telah dilaksanakan ijin lokasi sebanyak 69 ijin, atau mencapai 98,57% dari target tahun 2014 yang sebanyak 70 ijin. Jumlah ini walaupun belum mencapai target, tetapi sudah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun tahun 2013 sebanyak 62 ijin lokasi.

Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pada tahun 2014 target sengketa/konflik pertanahan yang dimediasi ditetapkan 100%. Jumlah kasus konflik pertanahan yang masuk sebanyak 46 kasus dan 100% telah dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan, jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 25 kasus atau 54,35%, jumlah kasus dalam proses mediasi 13 kasus atau 28,26%, jumlah kasus dalam proses hukum 8 kasus atau 17,39%

Sengketa/konflik pertanahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus dengan rincian sebagai berikut :



NO	Kecamatan	Kasus Terdaftar	Tingkat Penyelesaian Masalah	Keterangan
1.	Balongbendo	Penyelesaian status kepemilikan tanah eks PT. Ratatex di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo	Proses Mediasi	PT. Ratatex dimohon segera memperjelas status tanahnya dengan menghibahkan kepada Pemerintah Daerah, atau mewakafkan Ormas Muhammadiyah, atau menghibahkan kepada pihak lain melalui keputusan RUPS atau dimohon kembali oleh PT. Ratatex.
2.	Balongbendo	Makam Kristen di Desa Balongbendo Kec. Balongbendo antara Sdr. Pdt. Jimmy Rusni Rasyid dengan PT. Puspa Juwita.	Proses Hukum	Proses sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
3	Balongbendo	Pengurukan TKD Desa Bakungpringgondani oleh PT. Bumi Pringgondani Permai	Proses Mediasi oleh Kecamatan	-
4	Gedangan	Penggelapan hasil sewa TKD di Desa Semambung Kecamatan Gedangan oleh Kepala Desa Semambung	Proses Hukum	Proses hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5	Buduran	Pengaduan Sdr. Supriyadi yang mempermasalahkan tindakan Kepala Desa Sukorejo karena melarang Sdr. Supriyadi mendirikan bangunan diatas tanah miliknya yang telah bersertifikat SHM atas nama dirinya namun Kepala Desa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah desa Sukorejo.	Proses Mediasi oleh Kecamatan	-
6	Porong	Pengaduan permohonan surat keterangan waris oleh Sdr. Ismail kepada Pemerintah Desa Pesawahan yang dipersulit	Proses hukum	-
7	Waru	Sengketa Kepemilikan Tanah antara Sdr. M. Sa'i dengan PT. Sindo Perkasa Usahatama (Sdr. Henry J. Gunawan) dan PT. Sunindo Prima Land.	Proses hukum	Proses gugatan ke PTUN dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.
8	Sedati	Sengketa tanah di Desa Kalanganyar antara Pemerintah Desa Kureksari Kec. Waru dengan Sdr. Marngali.	Proses mediasi	Telah selesai dimediasi dengan hasil (1) menunggu kesiapan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo untuk memfasilitasi penunjukan lokasi tanah milik Ahli Waris Alm. Sdr. Marngali; (2) Apabila nantinya ada pihak yang tidak setuju dengan hasil penunjukan lokasi tanah masing-masing dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.



9	Wonoayu	Pengaduan Saudara Khusnul Arifin terkait pengurukan Sawah Gogol miliknya di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu oleh PT. Surya Multi Cemerlang seluas $\pm$ 1,5 Ha.	Proses mediasi	Hasil : (1) PT. SMC dimohon segera menyelesaikan permasalahan tanah sawah dengan sdr Khusnul (dengan jual beli atau tukar menukar/geser); (2) Jika tidak ada kesepakatan, para pihak (PT SMC dan Sdr. Khusnul disarankan menempuh jalur hukum agar segera mendapat kepastian hukum.
10	Sidoarjo	Penyelesaian Tanah Pengganti Aset Pemkab Sidoarjo (Eks TKD Kelurahan Sidoklumpuk) di Desa Klantingsari Hasil Tukar Menukar dengan PT. Avilla Prima.	Proses mediasi	Dalam proses mediasi penyelesaian tanah pengganti.
11	Sidoarjo	Pengaduan terkait permohonan surat keterangan riwayat tanah an. Kasdu yang tidak ditanggapi oleh Pemerintah Desa Gebang	Proses Mediasi	-
12	Gedangan	Tumpang tindih kepemilikan tanah antara TKD Tebel Kec. Gedangan di Desa Punggul Kec. Gedangan dengan sertifikat HGB milik PT. Jayaland	Proses mediasi	Telah selesai dimediasi dan menunggu persetujuan dari Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri.
13	Taman	Pengundangan Peraturan Desa Wage Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penghapusan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 1,7 Ha (8 Ancer) yang terletak di Blok Grumbul Desa Wage.	Proses hukum	Hasil : (1) Apabila Pemerintah Desa Wage merasa memiliki tanah 5 (lima) ancer (Nomor urut 94, 95, 96, 98, 99) yang saat ini tidak dikuasai/dimiliki desa, tetapi dikuasai/dimiliki pihak lain maupun perorangan, maka harus bisa membuktikan alas haknya maka Pemerintah Desa dapat menempuh jalur hukum; (2) Bahwa untuk memperoleh putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang merasa dirugikan disarankan untuk melakukan gugatan di pengadilan; (3) Bahwa rencana penghapusan TKD Wage mendasari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (4) Peraturan Desa Wage Nomor 1 Tahun 2013 belum dapat diundangkan dalam berita daerah.



14	Tanggulangin	Fasilitasi pengaduan tanah desa Gempolsari yang dilepas/dibayar BPLS kepada perorangan.	Proses hukum	Telah diklarifikasi dan dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
15	Krembung	Sengketa tanah antara H. Sholikin dengan Pemerintah Desa Krembung.	Proses hukum	Telah melalui sengketa di Pengadilan Negeri Sidoarjo dimenangkan oleh Pemerintah Desa Krembung, H. Sholikin mengajukan banding di Pengadilan Tinggi.
16	Prambon	Sengketa tanah milik Sdr. Hartono dengan PT. Bersatu Sukses Sejahtera di Desa Bendotretek.	Proses mediasi	Telah dimediasi oleh Pemerintah Desa Bendotretek dan Sdr. Hartono melalui kuasa hukumnya tidak puas dengan hasil mendiasi dan akan mengajukan Sidang Non Litigasi di Komisi Informasi Jatim.
17	Prambon	Permohonan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan gogol gilir menjadi gogol tetap Desa Bendotretek oleh petani gogol gilir Desa Bendotretek yang dipersulit oleh Kepala Desa Bendotretek.	Proses Mediasi	-
18	Prambon	Pengaduan warga perumahan Simogirang terkait permohonan perluasan lahan makam desa untuk warga perumahan.	Proses Mediasi	-
19	Prambon	Pengaduan terkait permintaan data tanah dan keterangan riwayat tanah an. Leginba.	Selesai melalui mediasi oleh Kecamatan	-
20	Tarik	Pengaduan dari NK Law Office selaku kuasa hukum dari Warsih dkk terkait tindakan pengurukan tanah miliknya dan permintaan pengembalian surat-surat tanah miliknya oleh Pemerintah Desa Gampingrowo.	Proses Mediasi	-
21	Tarik	Pengaduan sengketa lahan oleh H. Soetono AM di Desa Bakungpringgondani.	Proses mediasi	-



20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh SKPD yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi pemerintahan, Bagian Kerjasama, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Umum), Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta 18 Kecamatan, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

(a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2014, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, perhubungan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 77,75 atau kategori B (baik), dengan rincian pada tabel berikut :

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Gedangan	83,60	A (Sangat Baik)
2	Kecamatan Sedati	80,35	B (Baik)
3	Kecamatan Sukodono	79,33	B (Baik)
4	Kecamatan Buduran	78,60	B (Baik)
5	Kecamatan Waru	74,83	B (Baik)
6	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	65,60	B (Baik)
7	UPTD Parkir	61,90	C (Kurang Baik)
8	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	83,81	A (Sangat Baik)
9	Badan Lingkungan Hidup	73,10	B (Baik)
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	77,83	B (Baik)
11	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	83,70	A (Sangat Baik)
12	Puskesmas Porong	78,59	B (Baik)
13	Puskesmas Krembung	80,75	B (Baik)
14	Puskesmas Sekardangan	81,88	A (Sangat Baik)
15	Puskesmas Tulangan	79,37	B (Baik)



16	Puskesmas Jabon	77,01	B (Baik)
17	Puskesmas Trosobo	76,88	B (Baik)
18	Puskesmas Balongbendo	76,01	B (Baik)
19	Puskesmas Buduran	80,38	B (Baik)
20	Puskesmas Sukodono	83,84	A (Sangat Baik)
21	Puskesmas Urangagung	74,68	B (Baik)
22	Puskesmas Barengkrajan	81,05	B (Baik)
23	Puskesmas Taman	76,01	B (Baik)
24	Puskesmas Tanggulangin	78,04	B (Baik)
25	Puskesmas Sedati	78,67	B (Baik)
26	Puskesmas Tarik	80,39	B (Baik)
27	Puskesmas Prambon	80,09	B (Baik)
28	Puskesmas Gedangan	74,62	B (Baik)
29	RSUD	73,80	B (Baik)
Jumlah =		2.254,71	
Jumlah rata-rata =		77,75	B (Baik)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat usaha ekonomi masyarakat pedesaan (UPPKS, UED-SP, P3EL, BUMDES) yang berkembang

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan melalui perkembangan usaha ekonomi yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pencapaian UPPKS Dasar tahun 2014 yaitu 87 usaha atau 48,06% dari jumlah kelompok UPPKS sebanyak 181 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 12 usaha atau 16% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 75 usaha

Sedangkan Pencapaian UPPKS Berkembang tahun 2014 yaitu 63 atau 34,80% dari jumlah kelompok UPPKS sebanyak 181 unit usaha, sehingga



terdapat peningkatan sebanyak 12 usaha jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 51 usaha

Demikian pula untuk Pencapaian UPPKS Mandiri tahun 2014 yaitu 31 usaha atau 17,13% dari jumlah kelompok UPPKS sebanyak 181 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 3 usaha pencapaian tahun 2013 sebanyak 28 usaha.

Pencapaian UED-SP Dasar tahun 2014 sebanyak 53 usaha atau 48,18% dari jumlah kelompok UED-SP sebanyak 110 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 8 usaha atau 17,77% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 45 usaha.

Sedangkan Pencapaian UED-SP Berkembang tahun 2014 sebanyak 36 usaha atau 32,72% dari jumlah kelompok UED-SP sebanyak 110 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 5 usaha atau 16,12% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 31 usaha.

Demikian pula untuk Pencapaian UED-SP Mandiri tahun 2014 sebanyak 21 usaha atau 19,10% dari jumlah kelompok UED-SP sebanyak 110 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 5 usaha atau 31,25% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 16 usaha

Pencapaian P3EL Dasar tahun 2014 sebanyak 98 usaha atau 56% dari jumlah kelompok P3EL sebanyak 175 kelompok usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 12 usaha atau 13,95% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebanyak 86 usaha.

Sedangkan Pencapaian P3EL Berkembang tahun 2014 sebanyak 50 usaha atau 28,57%, dari jumlah kelompok P3EL sebanyak 175 kelompok usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 6 usaha atau 13,63% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebanyak 44 usaha.

Demikian pula untuk Pencapaian P3EL Mandiri tahun 2014 sebanyak 27 usaha atau 15,43% dari jumlah kelompok P3EL sebanyak 175 kelompok usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 4 usaha atau 17,39% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 23 usaha.

Pencapaian BUMDES Dasar tahun 2014 sebanyak 15 usaha atau 38,46% , dari jumlah BUMDES sebanyak 39 usaha.

Sedangkan Pencapaian BUMDES Berkembang tahun 2014 sebanyak 16 usaha atau 41,02% dari jumlah BUMDES sebanyak 39 usaha.



Demikian pula untuk Pencapaian BUMDES Mandiri tahun 2014 sebanyak 8 usaha atau 20,51% dari jumlah BUMDES sebanyak 39 usaha.

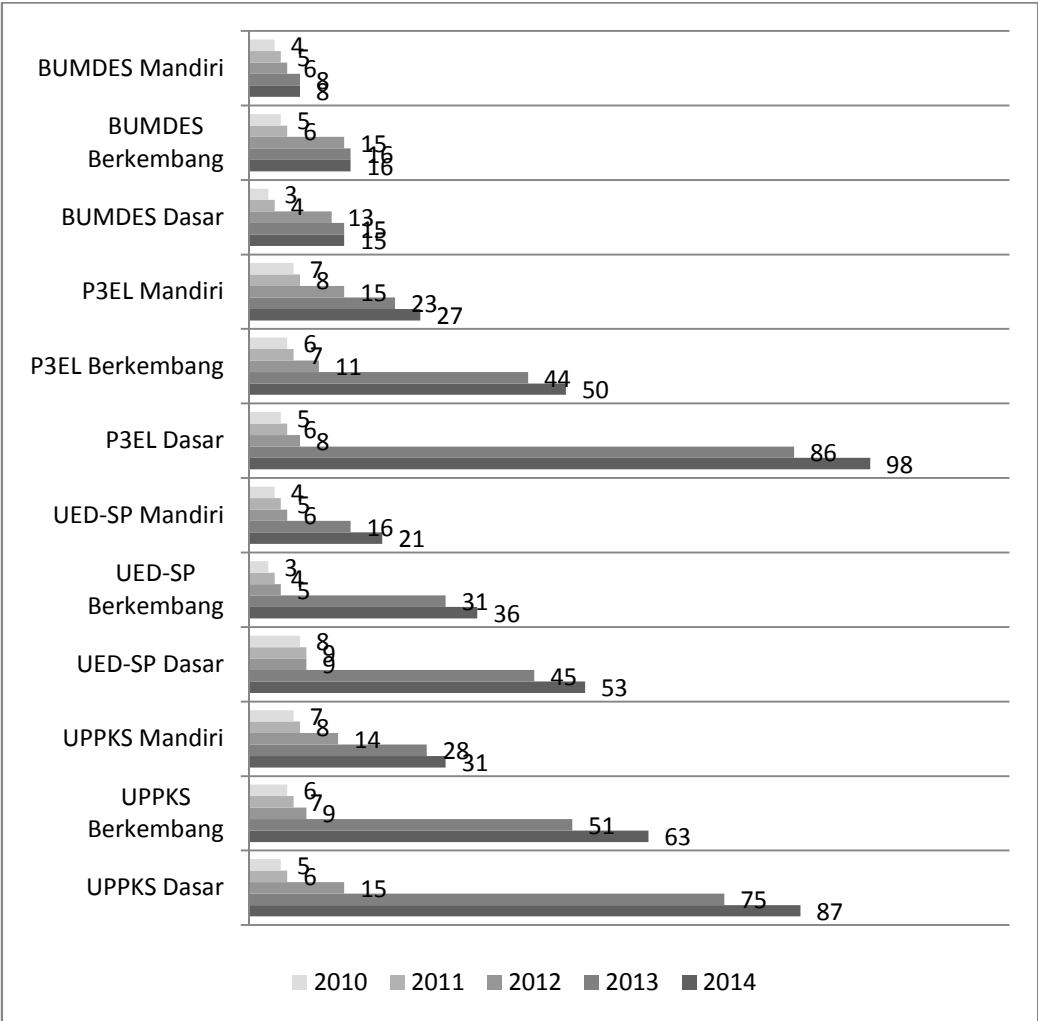
Untuk tahun 2014 kegiatan Badan Usaha Milik Desa tidak ada perkembangan karena tidak ditunjang dengan bantuan modal yang diberikan.

Apabila dilihat dari perkembangan usaha ekonomi melalui UPPKS, P3EL, UED-SP dan BUMDES, jumlah kelompok usaha dengan kategori dasar lebih besar dari pada kategori berkembang maupun mandiri sehingga masih diperlukan pembinaan, motivasi maupun dukungan agar usaha yang dilakukan semakin bertambah maju sebagai upaya menambah ekonomi keluarga.

Perkembangan tersebut selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik III.21.1

Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang



Sumber data : BPMPKB



Dari grafis terlihat bahwa perkembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan semakin membaik yang mencerminkan keberhasilan peningkatan peranserta dan inovasi masyarakat.

22. Urusan Sosial

Urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, serta Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA), indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi. Peran yang diambil pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengentasan ini lebih banyak pada fungsi koordinasi dan distribusi sumber daya, mengingat masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang rumit karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja atas indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani melalui pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan ketrampilan usaha dengan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo maupun dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani untuk tahun 2014 sebanyak 14.343 jiwa atau 35,55% dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 40.342 jiwa, atau 1,73% dari jumlah penduduk.

Realisasi yang tertangani tahun 2014 meningkat 35,66% dari tahun 2013.



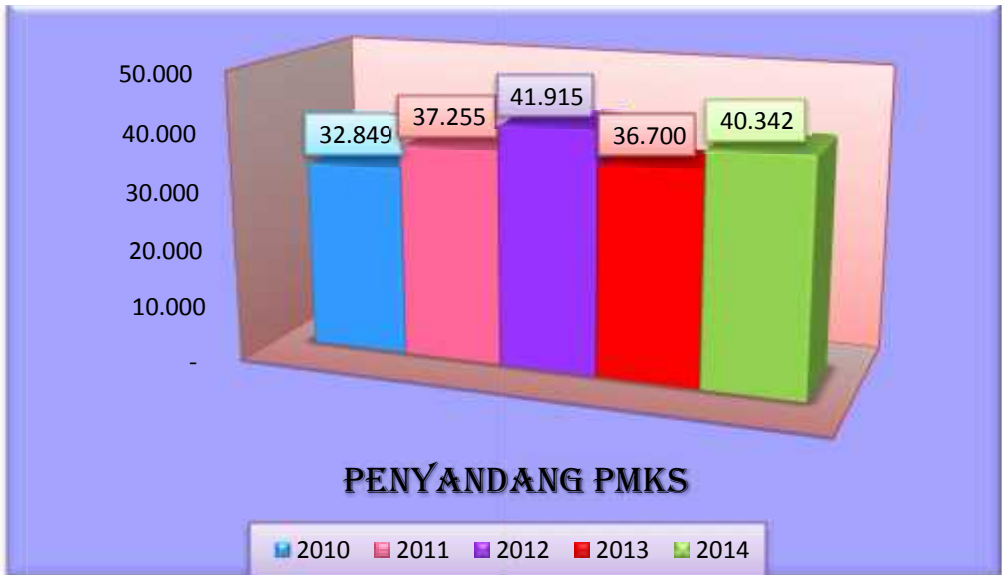
Tabel III.22.1

Data Jumlah PMKS dan Jumlah Penduduk 2010 – 2014

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS tertangani	% Tertangani	Jumlah Penduduk *)	% pmks thd. Jmlh penduduk
2010	32.489	822	2,53%	1.950.000	1,67%
2011	37.255	9.135	24,52%	1.980.000	1,88%
2012	41.915	8.860	21,14%	2.053.467	2,04%
2013	36.700	10.573	28,80%	2.090.619	1,76%
2014	40.342	14.343	35,55%	2.127.043	1,90%

Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Grafik III.22.1



Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

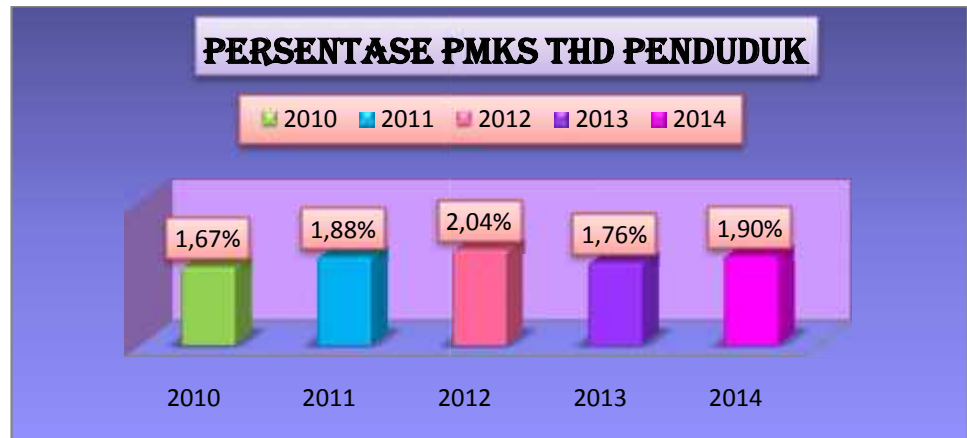
Pada grafik di atas, jumlah PMKS pada tahun 2014 meningkat 3.642 jiwa atau 9,92% di banding tahun 2013, sedangkan target RPJMD tahun 2014 jumlah PMKS belum tercapai sejumlah 29.845 jiwa dan target Tapkin 31.795 jiwa. Peningkatan jumlah PMKS pada Tahun 2014 disebabkan oleh :

1. Dampak urbanisasi,
2. Peningkatan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo
3. Meningkatnya fakir miskin yang diakibatkan berkurangnya area persawahan sehingga banyak para buruh tani yang kehilangan pekerjaan.
4. Dampak PHK oleh perusahaan.

Namun demikian peningkatan PMKS di Kabupaten Sidoarjo telah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan penanganan PMKS.

Persentase jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk tahun 2010 s.d 2014 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik III.22.2



Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Penyandang masalah kesejahteraan sosial menuntut perhatian yang serius bukan hanya pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo saja, namun partisipasi masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sangat dibutuhkan guna menekan populasi permasalahan sosial yang terjadi.

Pola penanganan yang telah dikembangkan selama ini untuk mengurangi jumlah masyarakat PMKS adalah melalui peningkatan kualitas SDM PMKS dengan memberikan pelatihan ketrampilan, bantuan peralatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Persentase jumlah penanganan PMKS.

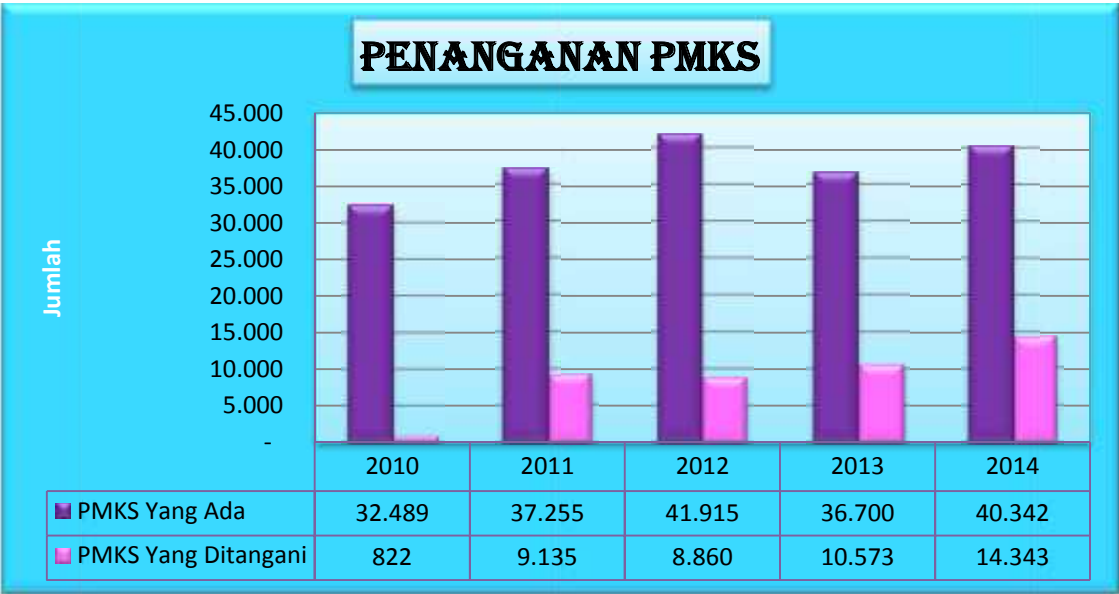
Indikator ini merupakan perbandingan jumlah PMKS yang ditangani tahun ini dibanding dengan jumlah PMKS yang ada.

Realisasi jumlah penanganan PMKS untuk tahun 2014 sebesar 14.343 jiwa atau 35,55 % tertangani dari 40.342 jiwa penyandang PMKS. Capaian kinerja ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 950 jiwa. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2013 sebesar 28,80 %, realisasi 2014 naik sebesar 6,75% .



Penanganan PMKS tahun 2014 mengalami kenaikan seperti tergambar pada grafik di bawah ini

Grafik III.22.3



Sumber data : Dinas sosial dan tenaga kerja

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan penanganan para penyandang PMKS melalui antara lain :

- 1) Mengoptimalkan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas instansi yang terkait dengan kegiatan pengentasan kemiskinan, antara lain : program raskin, BLT, PNPM Mandiri,dll;
- 2) Melakukan pembekalan manajemen kewirausahaan dan memberikan sarana bagi orang tua anak jalanan.
- 3) Program Keluarga Harapan (PKH).
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui UPT Liponsos



Tabel III.22.2
Data Penanganan PMKS Tahun 2014

NO	KEGIATAN	REALISASI (Org)
1	Program Keluarga Harapan	9.032
2	Bantuan Permakanan Panti Asuhan	2.349
3	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1.150
4	Bantuan Penyandang Cacat	16
5	Bantuan bagi Keluarga Miskin	20
6	Bantuan anak Keluarga Kurang Mampu (KKM)	200
7	Bantuan bagi Tuna Rungu	20
8	Bantuan bagi Tuna Sosial	11
9	Jaminan Sosial Lanjut Usia Akut	100
10	Bantuan bagi Perintis Kemerdekaan, Veteran dan Janda cacat veteran	157
11	Bantuan bagi Lansia kurang mampu	400
12	Bantuan bagi Anak Jalanan	10
13	Aslut	78
14	Panti	800
JUMLAH		14.343

Sumber data : Dinas sosial dan tenaga kerja

23. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pagelaran Seni budaya

Kegiatan dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni dan budaya bertujuan agar tetap terjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Pada tahun 2014 telah dilakukan pagelaran seni budaya maupun festival seni budaya yang diikuti oleh beberapa kelompok seni atau sanggar yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 250 kali di Kabupaten Sidoarjo, Luar Daerah Sidoarjo bahkan di Luar Negeri melalui kegiatan :



1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	Pagelaran Wayang Kulit	Jum'at, 7 Pebruari 2014	Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo	Dalang Ki Anom Suroto dengan Judul Semar Mbangun Khayangan
2	Pawai Budaya	Sabtu, 22 Pebruari 2014	Sepanjang Jalan Protokol	Diikuti oleh 18 Kecamatan dan 7 Peserta Umum
3	Mocopat	Senin, 31 Maret 2014	Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo	Tema : Teknis Membaca Mocopat yang benar, diikuti oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
4	Mocopat	Senin, 5 Mei 2014	Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo	Tema : Melestarikan Potensi Budaya Mocopat, diikuti oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
5	Mocopat	Senin, 9 Juni 2014	Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo	Tema : Teknis Membaca Mocopat yang benar, diikuti oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
6	Mocopat	Senin, 18 Agustus 2014	Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo	Tema : Hari Kemerdekaan RI diikuti oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
7	Mocopat	Senin, 22 September 2014	Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo	Tema : Persahabatan diikuti oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
8	Mocopat	Senin, 27 Oktober 2014	Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo	Tema Tetembangan dan Waosan Mocopat dalam rangka Hari Sumpah Pemuda

2) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	Festival Karya Tari se Jawa Timur	Rabu, 30 April 2014	UPT Taman Budaya Surabaya	Disporabudpar Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan
2	Festival Lagu Daerah se Jawa Timur	Jum'at, 2 Mei 2014	UPT Taman Budaya Surabaya	Disporabudpar Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan
3	Festival Lawak dan Jula-Juli	Sabtu, 3 Mei 2014	UPT Taman Budaya Surabaya	Disporabudpar Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan
4	Gelar Seni Budaya Jawa Timur	Minggu, 18 Mei 2014	TMII Anjungan Jawa Timur di Jakarta	Kolaborasi Seni Budaya Ludruk Campursari, Tari dan Wayang
5	Parade Seni Budaya Jawa Timur	Sabtu, 13 September 2014	Alun-alun Kabupaten Ngawi	Pawai Budaya Kolaborasi Sanggar Tari KDS Pimpinan Budi Alfian dan Komunitas Seni Jajan Pasar Pimpinan Suwandi



3) Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	Festival Dalang se Jawa Timur	Jum'at, 7 Maret 2014	UPT Taman Budaya Surabaya	Dalang Pringgo Djati Rachmanu mendapat juara 10 penyaji unggulan
2	Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Pagelaran Seni	Sabtu, 1 Nopember 2014	Kabupaten Sumenep	Kolaborasi Kreasi Dancer Sidoarjo dengan Pak Tris menampilkan Sendra Tari Dewi Sekardadu
3	Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Pawai Budaya	Minggu, 2 Nopember 2014	Kabupaten Sumenep	Pawai Budaya dengan Tema Kerajaan Jenggolo
4	Lomba Band "Sidoarjo Youth Band Competition 2014"	Jum'at, Sabtu, Minggu 7 s/d 9 Nopember 2014	Pazkul Kahuripan Nirwana Sidoarjo	Memperebutkan Kejuaraan : Juara I, II, III dan Juara Harapan I, II, III
5	Delegasi Budaya 1. Pagelaran Tari	Jum'at, Sabtu, Minggu 14 s/d 16 Nopember 2014	Batam	Sanggar Tari Kreasi Dancer Sidoarjo (KDS) pimpinan Budi Alfian
	2. Pagelaran Tari	Rabu s/d Minggu 26 s/d 30 Nopember 2014	Vietnam	Sanggar Tari Kreasi Dancer Sidoarjo (KDS) pimpinan Budi Alfian
6	Pagelaran Ludruk	Jum'at, Sabtu, Minggu 12 s/d 14 Desember 2014	GOR Sidoarjo	PALSI (Persatuan Artis Ludruk Sidoarjo)

4) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	Seminar Pengantin Putri Jenggolo Khas Sidoarjo	Rabu, 12 Maret 2014	Pendopo Delta Krida Budaya Disporabudpar Sidoarjo	Diikuti oleh Harpi Melati se Kabupaten Sidoarjo
2	Gelar Wayang Kulit Gagrak Jawa Timuran	Sabtu, 22 Maret 2014	Desa Sedengan Mijen Dsn. Gaglek Krian Sidoarjo	Dalang Ki Purwo Sableng dengan judul Wahyu Pamong Sejati
3	Pagelaran Tari dan Pentas Opera Delta Islami "Pengembaraan Dewi Sekardadu"	Senin, 21 April 2014	Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo	Dihadiri oleh Pejabat SKPD se Kabupaten Sidoarjo
4	Pagelaran Ludruk	Senin, 9 Juni 2014	Desa Balongdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo	Dalam Rangka Bersih Desa (Ruwah Desa & Nyadran) dihibur Pagelaran Ludruk Irama Baru Pimpinan Hadi Wijaya dari Balongbendo
5	Pagelaran Tari Anak Tradisional	Selasa, 10 Juni 2014	Stadion GOR Sidoarjo	Dalam Rangka Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Mengadakan Pagelaran Tari Anak Tradisional oleh Sanggar Tari Kreasi Dancer Sidoarjo (KDS) Pimpinan Budi Alfian
6	Pagelaran Reog Jaranan	Sabtu, 11 Oktober 2014	Panggung Disporabudpar	Pagelaran Reog Jaranan Pimpinan Hj. Fitri



7	Pagelaran Campursari, Lawak dan Tari	Sabtu, 22 Nopember 2014	Panggung Disporabudpar	Kolaborasi Sanggar Budaya Kenanga Indah Pimpinan Sutarman dan Sanggar Tari Delta Trivikrama Pimpinan Sutrisno Kasim
---	---	----------------------------	------------------------	---

Selain kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo di atas, ada juga beberapa kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebanyak 223 kali.

24. Urusan Statistik

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung informasi pembangunan, sebagai berikut :

1. Penyusunan buku Sidoarjo Dalam Angka yang berisikan data-data di Kabupaten Sidoarjo. Diantara data-data tersebut terdapat data kependudukan, data tenaga kerja, data industri, dan lain sebagainya yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Penyusunan buku PDRB Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam buku tersebut memuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo.
3. Penyusunan buku Profil Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan harapan dapat menjadi media informasi dan promosi yang baik bagi masyarakat di dalam maupun di luar Kabupaten Sidoarjo.

Diharapkan informasi-informasi yang dihimpun tersebut dapat memberikan manfaat bagi perencanaan untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.



25 Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

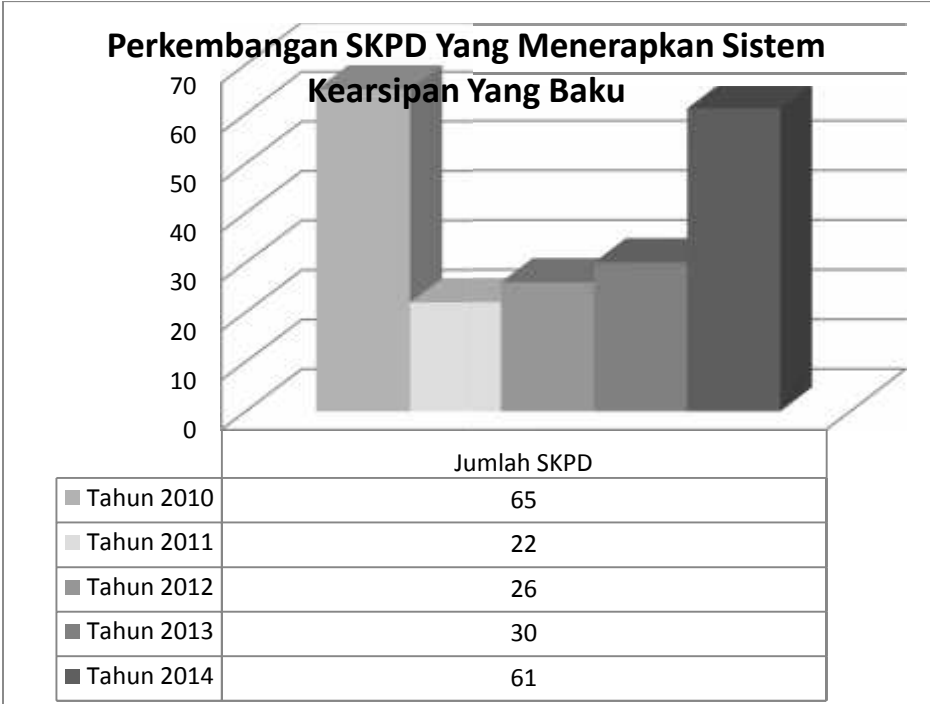
a. Monitoring kearsipan (Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku)

Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sampai dengan tahun 2014 yang telah menerapkan sistem kearsipan yang baku sebanyak 61 SKPD atau 100% SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tahun 2014 sebesar 11 SKPD, maka capaiannya sebesar 554% dari target, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan, dimana jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku sebanyak 30 SKPD atau peningkatan sebanyak 31 SKPD atau sebesar 103%.

Meningkatnya Jumlah SKPD yang menerapkan sistem kearsipan baku karena meningkatnya pembinaan, pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai arsip di SKPD.

Perkembangan Jumlah SKPD yang menerapkan sistem kearsipan yang baku selama lima tahun seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.25.1



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip



26 Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip, indikator kinerja yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Pengunjung Perpustakaan

Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini

Grafik III.26.1



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2014 tercapai sebanyak 85.185 pengunjung dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 59.621 pengunjung, maka realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 25.564 pengunjung atau 42,88% dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebesar 46.590 pengunjung, maka capaian target tingkat kunjungan perpustakaan telah tercapai sebesar 182,83%. Hal ini disebabkan :

- (1) Peningkatan prasarana perpustakaan yang representatif berupa adanya penambahan ruang area *free wifi*
- (2) Penambahan koleksi Buku
- (3) Penambahan Jam pelayanan dari 9 jam menjadi 11 jam
- (4) Adanya armada perpustakaan keliling sebanyak 3 (tiga) unit
- (5) Perpustakaan Online / dibukanya media jejaring sosial (internet) pada Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.



Upaya untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, antara lain :

- (1) Menyebarkan brosur kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo dan pengunjung perpustakaan
- (2) Mengoperasionalkan Mobil Perpustakaan Keliling ke sekolah - sekolah dan ke Desa/Kelurahan serta mengikuti kegiatan car free day setiap minggu
- (3) Memberikan layanan yang mudah dan cepat pada pengunjung perpustakaan dalam hal pembuatan kartu anggota maupun dalam hal peminjaman koleksi perpustakaan
- (4) Mengadakan kegiatan peningkatan SDM masyarakat tanpa dipungut biaya seperti
 - kursus komputer
 - kursus bahasa inggris
 - Pelatihan jurnalistik
- (5) Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :
 - Lomba memasak hasil baca buku dari Perpustakaan
 - Lomba mendongeng
 - Lomba uji cerdas implementasi baca

b. Jumlah buku perpustakaan

Realisasi jumlah buku pada tahun 2014 tercapai sebanyak 74.708 eksemplar, sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebanyak 57.000 eksemplar atau capaiannya sebesar 131%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 70.032 eksemplar jumlah buku mengalami peningkatan sebanyak 4.676 eksemplar atau 6,68%. Dengan semakin banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan ini diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.

Perkembangan jumlah buku perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.26.2



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip



Jumlah buku perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena pengadaan buku menjadi prioritas utama kegiatan perpustakaan. Dari grafik terlihat bahwa penambahan buku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu bertambah/meningkat secara signifikan, hal ini karena meningkatnya minat baca dan permintaan judul buku oleh masyarakat pengguna perpustakaan.

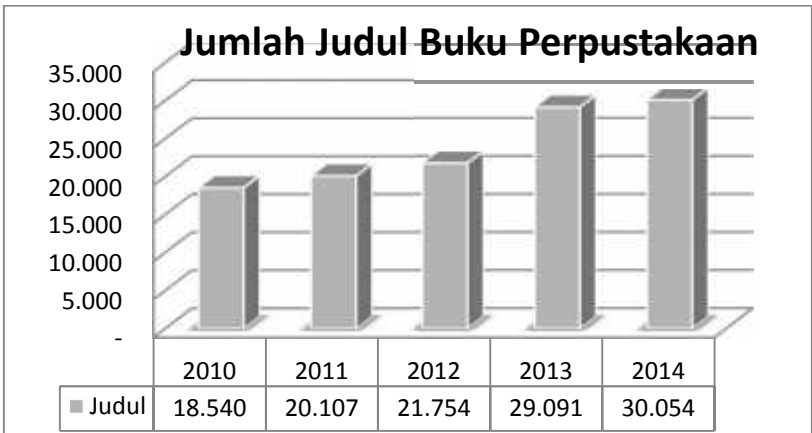
c. Jumlah judul buku perpustakaan

Realisasi tahun 2014 sebanyak 30.054 judul, sedangkan realisasi tahun 2013 sebanyak 29.091 judul ada peningkatan sebanyak 963 judul atau 3,31% dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebanyak 25.151 judul buku.

Dengan semakin banyaknya judul buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Sidoarjo merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan peminjam di Perpustakaan Sidoarjo.

Perkembangan jumlah judul buku perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.26.3



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Jumlah judul buku perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena pengadaan buku menjadi prioritas utama kegiatan perpustakaan.